Setahun
Rezim Perang



PUSAKA

UDEIDO COLLECTIVE

Tim Penyusun

Sutami Amin
Staf Penelitian Pusaka

Arief Rossi Ramadhan
Staf Pemetaan dan Informasi Geospasial Pusaka

Betty Adii
UDEIDO Collective

Costan Raharusun
UDEIDO Collective

Michael Yan Devis
UDEIDO Collective

Yanto Gombo
UDEIDO Collective

Setahun Rezim Perang

Daftar Isi

Pendahuluan **(1)**

Apa itu Rezim Perang **(3)**

Militerisasi Kekuasaan **(5)**

Ketahanan Nasional sebagai
Dalih Perampasan Tanah **(23)**

Korban Berjatuhan **(43)**

Desersi dan Perang Rakyat **(47)**

Referensi **(49)**

Pendahuluan

"Swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya" adalah instruksi langsung Prabowo yang disampaikan saat pidato pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Melanjutkan seruannya, "kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar." Begitu juga dengan energi, "dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek, negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri." Melalui persuasi kegentingan dan seruan-seruan kekacauan dunia, Prabowo sangat yakin bahwa kebutuhan pangan dan energi mesti diproduksi sendiri dan ditargetkan mencapai swasembada.

Sejak pidato pelantikannya, pemerintah nasional baru memprioritaskan seluruh kekuatan dan sumber daya untuk mencapai ambisi tersebut. Dalam dokumen visi-misi pencalonannya yang dikenal dengan Asta Cita, swasembada dituliskan paling pertama di antara tujuh belas capaian prioritas lainnya. Setelah memenangkan kontestasi pemilu yang penuh manuver politik, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menegaskan ambisi swasembada ke dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Hampir seluruh menteri dan kementerian ditugaskan mencapai usaha-usaha mencapai swasembada yang ditargetkan pada akhir masa jabatan. Beberapa di antaranya, Zulkifli Hasan sebagai Kemenko Pangan, Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan yang tidak kalah sentral peran Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia.

Walau bukan hal baru, ancaman pangan dan energi diakui menjadi perhatian banyak pemerintah nasional sejak krisis keuangan 2007–2008 hingga pandemi yang melanda seluruh dunia yang bersamaan dengan invasi perang Rusia dan Ukraina. Krisis memang telah membentuk wacana politik dan pembuat kebijakan di banyak belahan dunia. Dihadapkan dengan serangkaian masalah mendesak, reaksi pemerintah terhadap krisis pangan dan energi juga sangat beragam, mulai dari nada neo-Malthusian Trump hingga pendekatan yang lebih beragam seperti yang terlihat di Uni Eropa, Tiongkok, dan juga Indonesia. Trump misalnya dalam menangani krisis pangan dan energi berfokus pada peningkatan produksi domestik, deportasi, dan mendeklarasikan "darurat energi nasional" yang menghapuskan regulasi lingkungan yang membatasi ekstraksi bahan bakar fosil. Sementara Uni Eropa yang mengalami gangguan akut sejak semenjak perang Rusia-Ukraina memutuskan melakukan penghematan energi dan membuka pasar komoditas pangan lebih luas. Tidak berbeda dari kebijakan Donald Trump, Presiden Prabowo pada kenyataanya terus menarasikan situasi darurat pangan dan energi nasional, yang secara paralel mereproduksi gagasan ketahanan nasional.

Catatan ini berusaha memusatkan perhatian pada setahun Presiden Prabowo-Gibran. Kami melihat bahwa respon pemerintah terhadap krisis melalui diskursus ketahanan nasional muncul dari suatu logika, dimana perang dan ancaman permanen merangsek ke dalam pemerintahan, ekonomi serta kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita sedang atau sudah memasuki suatu fase yang Michael Hardt dan Sandro Mezzadra sebut sebagai rezim perang. Mengambil pelajaran dari proyek swasembada pangan dan energi di Merauke, tulisan ini juga berargumen bahwa rezim perang saat ini beroperasi telah

menimbulkan persoalan serius bagi penduduk pribumi, antara lain: perampasan tanah, ketakutan akibat kehadiran ribuan personel militer, dan dalam beberapa kasus menghilangkan kontrol penduduk pribumi atas tanah adat sekaligus mengkriminalisasinya.

Apa itu Rezim Perang?

Pengertian rezim perang dalam tulisan ini mengacu pada artikel Michael Hardt dan Sandro Mezzadra berjudul *A Global War Regime*, yang dapat diartikan sebagai tatanan politik di mana logika perang — pengawasan, penertiban, kontrol mobilitas, dan pendisiplinan populasi — dijadikan cara utama untuk mengatur ekonomi, perbatasan, dan kehidupan sosial, bahkan tanpa konflik bersenjata sekalipun. Pemahaman ini diperoleh dari pengamatannya terhadap konjungtur global saat ini ditandai dengan repertoar politik reaksioner yang menggabungkan militerisme dengan represi sosial-ekonomi. Retorika perang sering sekali dideklarasikan sejumlah figur pemimpin politik negara-bangsa dan termanifestasi dalam lanskap geopolitik dengan memperlihatkan kecenderungan bahwa perang bukan menjadi realitas masa lalu, melainkan hubungan sosial laten dengan bentuknya terbarunya.[1]

Dalam tulisan yang lain, Michael Hardt dan Antonio Negri meletakkan perbedaan perang yang terjadi pada masa lalu dan perang kontemporer. Menurut keduanya, periodisasi

1 Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). *A global war regime. Sidecar.*

perang menjadi titik awal yang berguna untuk membantu mengenali kesinambungan dan perbedaan dari konflik global sebelumnya. Perang Dunia Pertama dan Kedua, misalnya, perang terbatas pada konflik yang dibatasi secara temporal dan spasial antara negara-bangsa, meskipun terkadang dapat menyebar ke negara lain, dan akhir perang semacam itu umumnya ditandai dengan penyerahan diri, kemenangan, atau gencatan senjata antara negara-negara yang bertikai.

Sementara perang kontemporer mewujud dalam bentuk seruan metafora peperangan, seperti "perang terorisme", "perang melawan pandemi", "perang melawan kelaparan", atau bentuk-bentuk propaganda lainnya, yang berpotensi meluas kemana saja dan untuk jangka waktu yang tidak menentu. Selain pergeseran spasial dan temporal, perang terbaru juga dapat menginsinuasi musuh secara lebih fleksibel dan menyasar siapa saja yang bertentangan. Bagaimanapun perbedaan di antara keduanya, penggunaan kekuasaan dan kekerasan tetap tertanam.

Sebagai kekuatan yang tidak terpisahkan dari kemunculan rezim perang kontemporer, pemerintahan militer dan juga quasi-sipil tampil di garis depan mengorkestrasikan kekuasaan dan kekerasan yang terlegitimasi. Agar kekuasaan dan kekerasan memperoleh pembenaran, kehadiran musuh yang konstan dan ancaman kekacauan perlu dihadirkan. Sebagai ilustrasi, sebelum pemerintah Presiden George Bush menyerukan *War on Terror*, musuh pertama kali direkonstruksi sebagai sosok yang demonik dan melekat pada kelompok atau jaringan Al-Qaeda dan Taliban. Dengan dalih seperti inilah, Amerika Serikat menampilkan diri sebagai 'pahlawan penunggang kuda perang' dimana panji keamanan nasional serta dunia berada dalam tanggung jawabnya, sehingga operasi militer di berbagai

negara, penataan ulang geopolitik, dan pengawasan seluruh populasi dapat dimungkinkan. Sama dengan kampanye perang melawan teror, pandemi Covid-19 juga menjadi momentum penting bagi normalisasi keterlibatan rezim perang di seluruh dunia. Dengan narasi 'Perang Melawan Covid-19', pemerintah nasional termasuk Indonesia menegaskan peran militer yang menjangkau operasi kesehatan menyeluruh, distribusi vaksinasi dan menegakkan kontrol dengan pembatasan sosial.[2]

Pemusatan keadaan perang juga turut mengubah pangan dan energi sebagai kebutuhan dasar yang mesti dipenuhi di tengah situasi yang serba tidak stabil. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, ketahanan pangan dan energi merupakan masalah ketahanan nasional dan bila tidak ditangani akan berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik nasional. Sehingga tidak mengejutkan apabila urgensinya menjadi dasar bagi militer untuk merangsek masuk ke produksi pangan, energi, dan kehidupan sehari-hari.

Militerisasi Kekuasaan

Sebelum Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan umum secara telak dengan 58% suara di putaran pertama, muncul semacam kekhawatiran kalau trajektori politik yang termiliterisasi, mengingat latar belakangnya sebagai purnawirawan militer yang memiliki rekam jejak sangat buruk dalam

2 Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). *Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics*. The Military and Society. Springer, Cham.

pelanggaran hak-hak asasi manusia. Selama kampanye presiden 2024, misalnya, Prabowo memang kerap mencitrakan diri sebagai pemimpin perang dengan pidato berapi-api dengan mengumbar pesan ancaman bahwa bangsa ini berada dalam situasi krisis pangan, energi, dan geopolitik yang memburuk. Di tengah krisis semacam itu, Prabowo menyampaikan ambisinya mencapai swasembada pangan dan energi setelah terpilih menjadi Presiden Indonesia.

Setelah terpilih menjadi Presiden, kekhawatiran sebelumnya tampak semakin jelas. Pidato pelantikan yang disampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pintu masuk memahami rezim perang yang sedang dibangun pemerintahan Prabowo, dimana proyek swasembada pangan dan energi ditargetkan secepat mungkin. Untuk memastikan target prioritas pembangunan ini tercapai, diperlukan sebuah rezim perang, yang berciri militeristik yang berprinsip pada kepatuhan instruksi, disiplin, serta komando satu arah. Tidak mengherankan memang bila penyusunan personil dalam kabinet "Merah Putih" mencakup sejumlah individu berlatar belakang militer. Adhi Priamarizki dan Muhamad Haripin menghitung setidaknya 23 purnawirawan dan satu perwira militer aktif mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Menurut keduanya, pengangkatan sejumlah purnawirawan dan TNI aktif tidak hanya menjaga stabilitas politik dan konsolidasi kekuasaan, tetapi juga menjadi aktor pembangunan nasional yang lebih luas.[3]

3 Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). *A Most Militarised Cabinet*. New Mandala.



El-Maut (oleh Michael Yan Devis)

Di bawah kepemimpinan Prabowo, militer dan lembaga quasi-sipil seperti Kementerian Pertahanan menjadi sekutu kuat presiden dalam proyek ambisius swasembada pangan dan energi.[4] Menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Menhan Sjafrie mengungkapan fokusnya melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara. "Konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan," kata Menhan Sjafrie. Penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan yang dimaksud mengacu pada peran yang dimainkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan terdahulu untuk mengkoordinasikan proyek lumbung pangan, memperluas komando teritorial, serta mengembangkan batalyon teritorial pembangunan dan Kompi Produksi di setiap Kodim.

Dalam membangun sebuah rezim perang, dua prakondisi material mesti dipenuhi: pertama, konstruksi ancaman terhadap kedaulatan, dan kedua, militer atau quasis-sipil yang tampil mengorkestrasikan kekuasaan yang terlegitimasi serta bertindak dengan mengatasnamakan penyelamatan kedaulatan negara-bangsa. Untuk membangun situasi krisis, Presiden Prabowo berulang-ulang menekankan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan bagian dari masalah ketahanan

4 Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). Quasi-civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 164-183.

nasional secara keseluruhan. “Masalah pangan adalah kedaulatan. Pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegasnya dalam telekonferensi 3 Februari 2025. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di daerah dan meminta TNI bersama kepolisian serta dinas pertanian dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menghindari spekulasi pasar. Di Merauke, kenyataan seperti ini dapat terlihat dengan lebih terang dimana Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai operator langsung bersama pengusaha ekstraktif Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam untuk mencetak sawah dan membangun infrastruktur pertanian.

Dengan menyamakan ketahanan pangan dan energi sebagai masalah ketahanan nasional telah membenarkan klaim kehadiran Kementerian Pertahanan bersama sebagai penyelamatan di tengah situasi genting. Ideologi ‘NKRI Harga Mati’ diperkenalkan sebagai kendaraan ideologis bagi militer untuk melampaui operasi militer perang.[5] Tuntutan untuk dapat bekerja di luar domain perang dilegalkan dengan dalil Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang semakin luas sete-

5 Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). *The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara*. Routledge.

lah revisi UU TNI.[6] Dengan begitu, militer dapat menyesuaikan ulang dengan tuntutan demokratisasi tanpa kehilangan otonomi institusional; menormalkan kehadiran militer di ruang sipil; memperluas komando teritorial dan mengaktivasinya hingga unit terkecil, sehingga menjadi basis penting pembangunan rezim perang Presiden Prabowo dan Gibran.

Selain berpayung pada regulasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), praktik lain yang memperluas atau mengaktivasi tugas militer dalam keadaan damai dapat diinisiasi setidaknya dengan tiga cara berbeda, yaitu melalui Instruksi dan Perintah Presiden, arahan lisan, dan berbagai Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS).[7] Inpres dan Perpres digunakan sebagai alat eksekutif untuk mengaktifkan OMSP dalam pembangunan, tanpa memerlukan persetujuan DPR. Militer biasanya dimasukkan melalui mekanisme "dukungan teknis dan keamanan", bukan mandat tempur dan dibenarkan melalui wacana ideologis ketahanan nasional. Penulis mencoba menginventarisir variasi penerbitan Instruksi Presiden dan Perintah Presiden yang berkaitan dengan swasembada pangan dan energi antara lain:

6 Haripin, M. (2020). *Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war.* Routledge.

7 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). *Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia.* In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

No	Nomor & Jenis Peraturan	Bidang	Pokok Instruksi atau Ketentuan Utama	Potensi / Pola Keterlibatan TNI (OMSP)	Implikasi Politik & Ideologis
1	Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian	Pangan	Menetapkan struktur baru Kementan, memperkuat direktorat ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.	Tidak langsung, tetapi membuka jalur koordinasi TNI–Kementan untuk program pendampingan petani (Babinsa).	Menegaskan kembali logika "ketahanan nasional" sebagai dasar program pertanian strategis.
2	Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nasional	Pangan	Memerintahkan percepatan pembangunan dan perawatan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada beras dan jagung.	Babinsa dan Kodim diarahkan membantu koordinasi lapangan (pendampingan petani dan pengawasan proyek infrastruktur).	OMSP mewujud dalam bentuk "dukungan pembangunan"; menguatkan komando teritorial.
3	Inpres No. 10 Tahun 2025 tentang Percepatan Swasembada Jagung dan Kedelai	Pangan	Instruksi lintas kementerian untuk mempercepat produksi jagung dan kedelai nasional.	Dukungan logistik dan pengamanan lahan pertanian oleh TNI di daerah sentra.	Mendorong peran militer dalam ekonomi pedesaan; menghidupkan kembali peran Babinsa sebagai fasilitator produksi.

4	Inpres No. 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah	Energi & Pangan	Meningkatkan infrastruktur jalan daerah guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan energi.	Potensi keterlibatan Zeni TNI dalam pembangunan fisik jalan dan jembatan lokal.	Menghidupkan kembali "fungsi pembangunan" TNI seperti masa Orde Baru, dengan legitimasi teknokratis.
5	Inpres No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional	Lintas sektor	Menginstruksikan pembentukan kawasan swasembada terpadu dan sistem pemantauan digital; melibatkan Kementerian lintas sektor.	Kementerian Pertahanan dan TNI dilibatkan dalam pengamanan proyek strategis nasional, logistik, dan stabilisasi sosial di wilayah proyek.	Inpres ini menyatukan ide "ketahanan nasional" dengan "kedaulatan sumber daya"; membuka ruang militerisasi pembangunan.
6	Keppres No. 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional	Kelembagaan	Membentuk tim koordinasi lintas kementerian untuk mengawal implementasi Inpres No.14/2025.	Keterlibatan dalam Tim Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.	Memperkuat posisi eksekutif dalam kebijakan strategis nasional tanpa kontrol legislatif dan memperluas politik keamanan ke ranah pembangunan nasional.

7	Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan	Kehu-tanan	Membentuk Satuan Tugas yang bertugas menertibkan pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang berpotensi pada hilangnya penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara.	Satgas ini dikomandoi oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian. Dalam aktivi-tasnya dapat memobilisasi militer.	Dalam konteks OMSP, Satgas PKH menjadi wadah formal pelibatan militer dalam isu kehutanan dan agraria. Keterlibatan ini berope-rasi dalam fungsi sebagai pengamanan kawasan hutan dan pendamping-an penertiban.

Cara kedua, pernyataan lisan bisa menjadi preseden penting pelibatan militer. Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran biasanya tampil sangat aktif mempromosikan target-target swasembada dan memimpin rapat koordinasi lintas kementerian yang pernyataan publiknya tercatat oleh jurnalis atau media. Hal ini menandakan adanya perintah halus dari eksekutif sebagai selaku panglima tertinggi dan berpengaruh membentuk narasi publik bahwa pangan dan energi merupakan bagian dari ketahanan negara. Beberapa pernyataan berhasil kami daftarkan sebagai bagian cara arahan lisan presiden antara lain:

Pernyataan	Kapan & Di Mana	Isi Pokok	Indikasi Keterlibatan
"Tadi di sela-sela rapim, sempat ada pengarahan dari Presiden juga, bahwa Presiden sangat fokus tentang masalah pangan ini," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.	31 Januari 2025, Prabowo menyampaikan kepada jajaran pejabat TNI AD lewat *video conference* dalam rapat pimpinan TNI AD yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan.	Presiden Prabowo Subianto meminta TNI AD fokus mengurus masalah ketahanan pangan demi memperkuat lumbung pangan yang ada di daerah.	Berdasarkan perintah presiden tersebut, Maruli langsung mengambil inisiatif dalam program ketahanan pangan seperti memanfaatkan lahan tidur di seluruh Indonesia menjadi perkebunan dan lumbung pangan.
"Saya ingat didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kenapa ikut urus pangan, karena pangan adalah sumber dari sebuah negara," kata Prabowo dalam sidang kabinet.	5 Mei 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pesan ini saat sidang kabinet.	Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan penting TNI-Polri dilibatkan untuk mengurusi masalah pangan. Prabowo menilai pangan adalah sumber dari suatu negara.	Prabowo menyebut upaya melibatkan TNI-Polri salah satunya saat mengatasi kekeringan. Prabowo menjelaskan urusan kekeringan bisa diatasi dengan pengaliran air lantaran banyaknya sungai di Indonesia. Saat itu, Indonesia pun melakukan pengadaan 80.000 pompa. Puluhan alat itu harus dipasang dan akhirnya harus melibatkan unsur TNI-Polri.

“Hari ini kita kolaborasi, tanda tangan komitmen untuk mencapai swasembada sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian.	12 Desember 2024, ungkapan ini diambil dari Menteri Pertanian saat melakukan Rapat Koordinasi Swasembada Pangan bersama jajaran TNI di Jakarta.	Mentan bekerjasama dengan TNI AD dalam rapat koordinasi untuk memperkuat kesiapan lapangan swasembada pangan.	Ini adalah contoh nyata keterlibatan militer (TNI AD) dalam program swasembada pangan.
“Presiden Prabowo Tegaskan Energi dan Pangan adalah Kunci Kedaulatan Bangsa”	21 Mei 2025, pada pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex), ICE BSD, Tangerang. Dewan Pertahanan Nasional RI	Prabowo mengatakan bahwa kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan untuk memenuhi pangan sendiri dan juga energi sendiri. Dan menyebut bahwa di energi, proyek Forel & Terubuk (produksi minyak & gas) adalah tonggak penting dalam upaya swasembada energi.	Menunjukkan bahwa pangan dan energi bukan hanya ekonomi, tapi dianggap bagian dari “keamanan nasional/kedaulatan”. Walau belum menyebut TNI, dasar ini bisa dipakai untuk legitimasi OMSP bila ada kebijakan yang menugaskan militer dalam implementasi.

“Prabowo: Saya Tidak Akan Tenang Sebelum Indonesia Swasembada Pangan”	5 Juni 2025, acara Panen Raya Jagung Serentak di Bengkayang, Kalimantan Barat.	Prabowo menyatakan komitmen terhadap pencapaian swasembada pangan, bahwa setiap provinsi dan pulau harus mandiri dalam produksi pangan.	Presiden menyebut kerja sama dengan Kapolri dan Panglima TNI dalam konteks implementasi kebijakan pangan.
"Kalau TNI memang sudah dari awal terlibat sudah beberapa tahun lalu dan terus kita libatkan,” ucap Prabowo.	5 Juni 2025, Prabowo hadir langsung ke Bengkayang, Kalbar, melihat panen raya jagung.	Prabowo menyatakan bahwa swasembada pangan adalah kunci keamanan masyarakat, dan bahwa TNI/Polri perlu ikut turun menangani pangan agar keamanan bisa terjaga.	Pernyataan ini secara langsung mengaitkan program pangan dengan keamanan, dan menyebut TNI/Polri harus terlibat.



Cara ketiga yang berkaitan erat dengan sebelumnya, yaitu melalui penyediaan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Namun sebelum dua kesepakatan formal ini disepakati, biasanya muncul kesepakatan bersama baik itu permintaan militer sendiri atau lembaga negara lain untuk memberi sinyal untuk mengaktivasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita, misalnya, meminta para komandan distrik militer (dandim) untuk memanfaatkan satuan-satuan tempur di wilayah masing-masing untuk membantu keberhasilan program swasembada pangan.

Elegi Tanah Marind
(oleh Costan Raharusun)

Kementerian Pertanian, sebagai penanggung jawab utama (*leading sector*) program prioritas pemerintah swasembada pangan, dengan begitu dapat melibatkan jajaran TNI, termasuk TNI Angkatan Darat untuk membantu mencetak sawah di daerah-daerah. Perlu menjadi catatan bahwa Kodim bertugas memantau ancaman pertahanan di tingkat kabupaten dan tidak memiliki kekuasaan mengerahkan pasukan tempur. Hanya sesudah Prabowo berkuasa, Kodim diberikan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Pada rezim Jokowi, penggunaan Nota Kesepahaman meningkat secara dramatis, dengan laporan yang menunjukkan bahwa TNI telah menandatangani lebih dari seratus perjanjian dengan lembaga sipil.[8] Penerbitan ini kemudian membolehkan militer bertindak dalam ranah sipil tanpa status darurat atau operasi militer formal, yang memungkinkan komando TNI dari tingkat provinsi hingga pedesaan untuk berperan aktif dalam perluasan proyek-proyek pertanian dan energi kementerian. Militer ditugaskan merencanakan kawasan swasembada dengan sistem pertahanan negara atau bantuan, yaitu personel melalui Batalyon Infanteri Pembangunan, pengerahan alat, penyediaan logistik logistik, pendirian pos komando dan fasilitas pendukung, serta pengamanan wilayah. Beberapa Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berhasil diidentifikasi antara lain:

8 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). *Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia*. In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

Penerbitan	Pihak yang Terlibat	Cakupan	Isi Poko	Bentuk Dukungan / Keterlibatan militer
4 Desember 2023	MoU antara Panglima TNI & Menteri Pertanian	Nasional	Penguatan sinergi TNI–Kementan dalam program kembalikan swasembada pangan, optimalisasi lahan tidur, dan Pendampingan petani.	Keterlibatan Babinsa, Zeni TNI, dan komando kewilayahan dalam pembukaan lahan dan distribusi pupuk/benih.
12 Februari 2025	MoU antara Panglima TNI, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup	Nasional	Kerjasama dalam berbagai pekerjaan strategis antara Panglima TNI, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.	Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional.

8 Maret 2024	PKS antara TNI AD & Kementan: Pemanfaatan Sungai Besar dan Pompanisasi untuk Pertanian	Nasional	Optimalisasi lahan pertanian melalui pompanisasi dan pemanfaatan sungai besar untuk memperluas areal tanam padi.	TNI AD melalui Zeni & Babinsa terlibat langsung dalam pompanisasi dan infrastruktur irigasi.
18 Maret 2025	MoU antara Pemkab Merauke & Korem 174/ ATW (TNI AD)	Merauke, Papua Selatan	Optimalisasi lahan pertanian 5.000 ha untuk mendukung swasembada pangan dan Food Estate Merauke.	Korem 174/ ATW bertugas mengerahkan alat berat, tenaga kerja, dan pengamanan proyek.
19 Agustus 2025	MoU antara Kemhan & PT Pertamina Gas Negara (PGN)	Nasional	Penguatan kerjasama pertahanan dan energi untuk distribusi gas dan keamanan fasilitas energi nasional.	Unsur TNI (melalui Kemhan) memberikan dukungan pengamanan, logistik, dan pemantauan objek vital energi.
11 Oktober 2025	MoU dilakukan oleh Wakil Panglima TNI dan Direktur Utama PT Agrinas	Nasional	Kerjasama operasionalisasi Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.	Kerja sama pembangunan 80.000 gerai Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia
12 Oktober 2025	PKS antara TNI AD, Kementan, dan PLN di Merauke (Telagasari, Kurik)	Merauke, Papua Selatan	Kolaborasi penyediaan listrik pertanian dan pompa listrik di area swasembada.	TNI AD membantu pelaksanaan lapangan, penyediaan tenaga kerja, dan pengamanan fasilitas PLN.

Perkembangan yang tidak terpisah dari suatu rezim perang Presiden Prabowo dan Gibran adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan hubungannya dengan Agrinas Palma Nusantara. Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025, perang atas aktivitas ilegal dalam hutan dikomandoi oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian. Dalam tugasnya, Satgas berperan sebagai otoritas dapat menertibkan penggunaan hutan yang tidak sesuai peruntukan dan diperbolehkan mengerahkan pasukan. “Keberadaan Satgas PKH merupakan langkah strategis dan terobosan kebijakan dalam penertiban serta pemulihan fungsi kawasan hutan,” ungkap Sjafrie Sjamsoeddin dalam sambutan penyerahan kawasan hutan tahap kedua. Hingga sekarang, total luas kawasan hutan yang dikuasai ulang Satgas mencapai 3.312.022,75 hektar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 915.206,46 ha sudah diserahkan kepada kementerian terkait yang sebagian besar dialokasikan kepada Agrinas Palma Nusantara.

Agrinas Palma Nusantara merupakan badan usaha negara yang bertugas mengelola lahan perkebunan sawit dan biodiesel untuk ketahanan energi. “PT Agrinas Palma Nusantara sebagai entitas pengelola yang ditunjuk negara untuk mengelola hasil penertiban kawasan hutan secara produktif,” sebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sebelum berubah menjadi perusahaan perkebunan, badan usaha negara ini bernama PT Indra Karya yang bekerja pada sektor konstruksi. Dengan sekejap, Agrinas Palma Nusantara digadang-gadang menjadi perusahaan perkebunan raksasa yang sebagian besar tanahnya diperoleh dari hasil sitaan Satgas. Pada salah satu kunjungannya di Papua Selatan, Direktur Agrinas Palma Nusantara bersama Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Staf Umum

(Kasum) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) berkunjung ke Merauke untuk meninjau lokasi pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel pada bulan Juni. Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

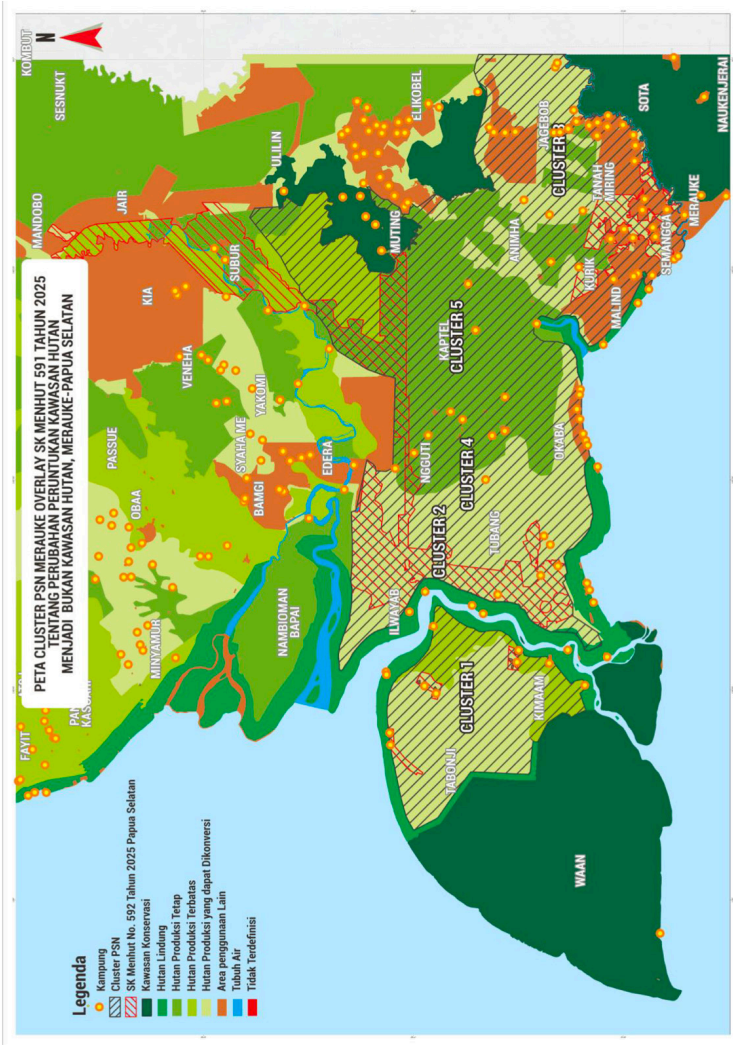
Terakhir, reproduksi kekuasaan rezim perang dimungkinkan melalui kontrol teritorial. Pada bulan Agustus lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Lanud Suparlan, Jawa Barat. Enam Kodam baru yang dibentuk berada di wilayah strategis dan memiliki nilai penting bagi keamanan nasional, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol untuk Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten meliputi Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta Kodam XXIV/Mandala Trikora berkedudukan di Merauke, Papua Selatan. Sejak menjadi Kemenhan, Prabowo memang sudah berencana membangun Kodam di setiap provinsi, termasuk di empat Daerah Otonomi Baru di Papua. Tentunya pembangunan Kodam sudah pasti membiakkan struktur komandonya hingga ke unit terkecil, yaitu desa atau kampung.

Sementara Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan merupakan strategi pertahanan yang dipersiapkan untuk mendukung pembangunan nasional. Selain kemampuan tempur, pasukan

ini juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. “Intinya, ini adalah batalyon infanteri. Jadi, dia harus punya lapangan tembak sehingga prajurit harus mahir menembak,” ujar Menhan Sjafrie. “Namun, di saat yang sama, mereka juga bisa dikumpulkan menjadi satu batalyon pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan,” tambah Menhan. Kedua pasukan ini akan bergabung bersama Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang sama-sama mendukung keamanan dan percepatan pembangunan. Lima batalyon yang sudah terbentuk adalah Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha di Keerom, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya di Sarmi, Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri di Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya. Kekuatan-kekuatan ini memungkinkan Presiden Prabowo dan Gibran mengakselerasi komando kekuasaannya.

Ketahanan Nasional sebagai Dalih Perampasan Tanah

Sejak pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo memberi prioritas pada ambisinya menciptakan swasembada pangan dan energi. Seperti yang dijelaskan Jun Honna (2002) bahwa dengan sentimen ketahanan nasional telah membenarkan segala praktik kekuasaan, seperti perampasan tanah yang kian meluas dan pelibatan militer yang dalam. Di Merauke, rezim perang telah memobilisasi seluruh kekuatan yang memaksa masyarakat adat menyerahkan tanah, merampingkan regulasi, menganggarkan ongkos, mengubah penataan ruang geografis, serta mendatangkan ribuan tentara yang dengan paksaan mampu mempercepat segala-galanya.



Peta PSN Overlay Perubahan Kawasan Hutan SK Kementerian Kehutanan No. 591/2025 (Arief Rossi Ramadhan, 2025)

Melalui justifikasi ketahanan nasional, tanah seluas 2,6 juta hektar di Merauke akan berubah menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi. Secara keseluruhan, PSN Merauke terbagi menjadi tiga proyek antara lain: ***Pertama***, proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, dan mahasiswa Polbangtan; ***Kedua***, proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke. Dan ***ketiga***, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas 563.661 hektar. Pembagian petak-petak konsesi tanah ini berperan sebagai strategi pengajuan klaim pembuatan batas, yang mendukung pengambilalihan kontrol tanah dan mengesahkan klaim oleh otoritas politik hukum dan kelembagaan, yang secara efektif mengubah pemilik tanah menjadi pelanggar batas hanya dengan 'goresan pena'.[9]

9 Giorgio, D. E., (2024). *A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. Journal of Agrarian* Change, 24(1)

Untuk membantu pembaca, penulis berusaha menyajikan lini masa perkembangan swasembada pangan dan energi di seluruh wilayah Papua Selatan. Kami mengidentifikasi beberapa aktivitas penting, seperti pernyataan, kunjungan, rapat, penerbitan regulasi, penyesuaian tata ruang, serta praktik-praktik yang dianggap berkontribusi pada percepatan swasembada pangan dan energi sebagai berikut:

Tanggal	Siapa	Lokasi	Keterangan
17 Apr. 2024	Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra	Distrik Semangga / KSPP I Merauke	Meninjau panen raya dan progres pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan.
17 Mei 2024	Menteri Investasi / BKPM Bahlil Lahadalia	Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Merauke	Meninjau perkebunan tebu Global Papua Abadi.
7 Okt. 2024	Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra	Jakarta	Wamenhan, M. Herindra memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
13 Okt. 2024	Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman	Wanam, Merauke, Papua Selatan	Peninjauan lanjutan lahan pengembangan Kawasan Sentra Pangan bersama Kementan dan koordinasi teknis pelaksanaan proyek.

18 Okt. 2024	Sekretaris Baranahan Kemhan Laksamana Pertama TNI Mochamad Taufik Hidayat	Jakarta	Rapat Tindak Lanjut Rakor Pengembangan Ketahanan Pangan di Kab. Merauke Prov. ›Papua Selatan. Dalam rapat ini menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri dalam proses pengintegrasian perubahan kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
20 Okt. 2024	MPR RI	Jakarta	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Sidang Paripurna dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada kesempatan ini Prabowo berpidato tentang rencana prioritasnya mencapai swasembada pangan dan energi di tengah ancaman global.
21 Okt. 2024	Presiden Prabowo Subianto	Jakarta	Pemerintah nasional membentuk kabinet Merah Putih. Berbagai literatur menyebut sebagai kabinet militeristik, karena sebagian besar berlatar belakang militer aktif atau purnawirawan. Sjafrie Sjamsoeddin diangkat sebagai Kemenhan dan Muhammad Herindra menjabat sebagai Kepala BIN.

3 Nov. 2024	Presiden Prabowo Subianto	Merauke, Papua Selatan	Kunjungan perdana Presiden meninjau perkembangan swasembada pangan (demplot padi, panen, optimalisasi lahan, dan infrastruktur areal), menyampaikan komitmen swasembada pangan; didampingi Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Panglima TNI, PJ Gubernur Papua Selatan, dan pengusaha Haji Isam.
10 Nov. 2024	Yonif Teritorial Pembangunan	Merauke, Papua Selatan	Yonif teritorial pembangunan tiba di Merauke. Tiga pasukan, yaitu Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/ Wimani Mambe Jaya, dan Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri. Seluruh pasukan ini dikerahkan untuk program pemerintah khususnya program ketahanan pangan.
25 Nov. 2024	Menteri Pertahanan	Jakarta	Menteri Pertahanan menyampaikan perhatiannya pada situasi ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara. Pada kesempatan ini juga, Menhan berencana mengembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun 2025. Rencana ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, RI.

30 Jan. 2025	Presiden Prabowo	Jakarta	Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres ini ditandatangani 4 Februari 2024.
10 Feb. 2025	Presiden Prabowo	Jakarta	Melalui Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pertama, Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas ketahanan pangan nasional dan Wanam dirancang menjadi salah satu wilayah PSN untuk pusat cadangan pangan nasional.
8 Juni 2025	Menteri Pertahanan	Boven Digoel, Papua Selatan	Didampingi oleh Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan, Direktur Utama Agrinas Palma, serta Gubernur Papua Selatan berencana mengembangkan program biodiesel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, khususnya solar.

8 Juli 2025	Menteri Pertahanan	Boven Digoel, Papua Selatan	Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan ke Boven Digoel, Papua Selatan, Senin (7/7/2025) untuk meninjau Batalyon Teritorial Pembangunan 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri atau BTP 803/ KYK. Dalam kunjungan ini Menhan Sjafrie didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang didampingi Gubernur Papua Selatan.
13 Juni 2025	Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani, Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.	Wanam, Merauke, Papua Selatan	Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani meninjau pertanian dan cetak sawah di Wanam, Papua Selatan.
9 Juli 2025	Kementerian BUMN Erick Thohir	Jakarta	Menteri BUMN, Erick Thohir mengangkat Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani menjadi Direktur Utama Bulog dan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Marga Taufiq sebagai Wakil Direktur Utama.
5 Aug 2025	Presiden Prabowo Subianto	Jakarta	Presiden menerbitkan Inpres 14 tahun 2025 untuk mempercepat kemandirian nasional di bidang pangan, energi, dan air dan menunjuk kementerian/lembaga berkoordinasi untuk itu.
10 Aug 2025	Presiden Prabowo Subianto	Jakarta	Peresmian Kodam XXIV/Mandala Trikora yang dipimpin Mayjen TNI Lucky Avianto yang tiba sebulan kemudian pada 10 September 2025. Walau menyebutnya secara halus, Pangdam menyampaikan harapannya menciptakan situasi aman dan tertib, sehingga pembangunan bisa berjalan.

25 Aug 2025	Presiden Prabowo Subianto	Jakarta	Presiden memberi penghargaan Bintang Mahaputera Utama diberikan sebagai tanda jasa dan tanda kehormatan bersama 140 tokoh lainnya di Istana Negara. Dua diantaranya adalah pendukung program swasembada pangan, yaitu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam, dan mantan Bupati Merauke, John Gluba Gebze.
27 Aug 2025	Kemenko Pangan Zulkifli Hasan	Wanam, Merauke, Papua Selatan.	Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional meninjau langsung perkembangan di kawasan Wanam dan melakukan rapat terbatas dipimpin oleh Menko Pangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Dirut Pindad serta Kepala Badan Logistik Pertahanan.
16 Sep 2025	Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo	Merauke, Papua Selatan	Gubernur Papua Selatan dengan surat Nomor 600.3928/PPS/IX/2025 mengajukan permohonan penambahan kebutuhan lahan rencana pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional seluas kurang lebih 486.939 ha.
18 Sep 2025	Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni	Jakarta	Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 591 tahun 2025 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalam SK tersebut, luas hutan yang dikonversi antara lain: Boven Digoel seluas 143.142 ha, Mappi seluas 9.731 ha, dan Merauke seluas 333.966 ha.

25 Aug 2025	Presiden Prabowo Subianto	Jakarta	Presiden memberi penghargaan Bintang Mahaputera Utama diberikan sebagai tanda jasa dan tanda kehormatan bersama 140 tokoh lainnya di Istana Negara. Dua diantaranya adalah pendukung program swasembada pangan, yaitu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam, dan mantan Bupati Merauke, John Gluba Gebze.
27 Aug 2025	Kemenko Pangan Zulkifli Hasan	Wanam, Merauke, Papua Selatan.	Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional meninjau langsung perkembangan di kawasan Wanam dan melakukan rapat terbatas dipimpin oleh Menko Pangan untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Dirut Pindad serta Kepala Badan Logistik Pertahanan.
16 Sep 2025	Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo	Merauke, Papua Selatan	Gubernur Papua Selatan dengan surat Nomor 600.3928/PPS/IX/2025 mengajukan permohonan penambahan kebutuhan lahan rencana pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional seluas kurang lebih 486.939 ha.
18 Sep 2025	Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni	Jakarta	Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 591 tahun 2025 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalam SK tersebut, luas hutan yang dikonversi antara lain: Boven Digoel seluas 143.142 ha, Mappi seluas 9.731 ha, dan Merauke seluas 333.966 ha.

24 Sep 2025	Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto	Jakarta	Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang memasukkan Program Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
25 Sep 2025	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Merauke, Papua Selatan	Setelah menjadi daerah otonomi baru, pemerintah berencana menyusun dokumen Tata Ruang Wilayah di Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2044. Penyusunan dokumen ini berkaitan dengan ditunjuknya kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta rancangan pembangunan nasional.
29 Sep 2025	Kemenko Pangan Zulkifli Hasan	Jakarta	Rapat Koordinasi Tingkat Kementerian tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Pangan, Energi dan Air Nasional

Ambisi swasembada pangan dan energi begitu mencolok dalam setahun kekuasaan rezim perang Presiden Prabowo dan Gibran. Secara berkala pemerintah meninjau ketiga proyek di atas. Setelah pelantikan dan membentuk kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo dengan segera mengunjungi Merauke. Bersama Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Panglima TNI, PJ Gubernur Papua Selatan, John Gluba Gebze serta pengusaha Haji Isam, Presiden berkunjung ke Telaga Sari, Distrik Kurik dan Wanam, Distrik Ilwayab. Rombongan ini datang meninjau langsung proses tanam, panen, serta cetak sawah dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional.



Ratapan di Tanah "Eden" (oleh Costan Raharusun)

Sementara di utara kota Merauke, 2 dari 10 perusahaan penerima konsesi terus mengambil alih, merontokkan pohon, merusak vegetasi alamiah, dan menggantinya dengan tanaman komersial tebu. Global Papua Abadi dan Murni Nusantara Mandiri adalah dua perusahan perkebunan yang memperoleh konsesi masing-masing seluas 30.777 hektar dan 52.395 hektar. Agar tanah seluas itu terlepas dari penguasaan terdahulu, kedua perusahaan ini datang membawa sejumlah uang dan berjanji membawa kemakmuran kepada pemilik tanah dari suku Marind, Yei-nan, atau suku-suku lain yang penghidupannya bergantung pada tanah dan hutan. Tetapi tidak jarang pertemuan dengan penduduk pribumi, perusahaan perkebunan membawa personil tentara dengan dalih pengamanan.

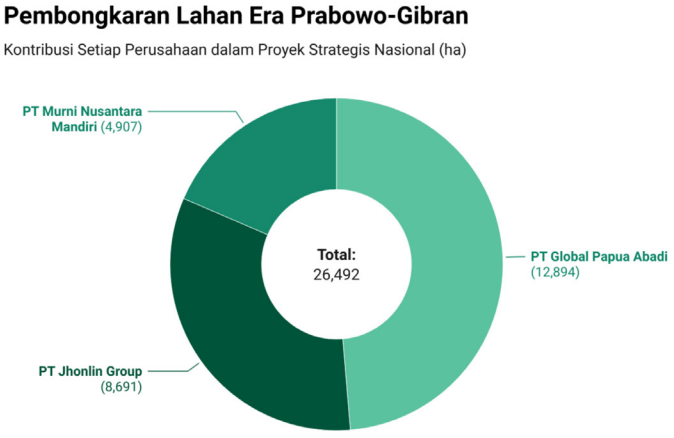
Ketahanan telah melegitimasi rezim perang mengorkestrasikan kekuasaannya. Sejak awal proyek, militer terus berada di garis depan. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra ditunjuk menjadi penanggung jawab pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung swasembada pangan yang sekarang dikerjakan bersama perusahaan Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad, seorang konglomerat ekstraktif yang memiliki hubungan kuat dengan Presiden Prabowo. Selang beberapa waktu, ribuan eskavator dan pasukan tentara mulai berdatangan tidak lain untuk menduduki tanah, membongkar, menakuti dan memaksa penduduk pribumi menerima kenyataan kalau tanah adat akan berubah menjadi sawah, jalan raya, dan perkebunan tebu. Merauke dengan segera berubah menjadi wilayah yang paling termiliterisasi. Tiga pasukan batalyon, yaitu Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, dan Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri dikerahkan. Jika diasumsikan satu batalyon berjumlah 700

hingga 1.000 personel militer, artinya secara kumulatif jumlah mencapai 2.100 hingga 3.000 personel. Jumlah ini cenderung meningkat seiring peresmian Kodam XXIV/Mandala Trikora.

Kedua proyek raksasa ini, baik cetak sawah satu juta hektar dan perkebunan tebu, yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur militer di seluruh penjuru memang tidak mengenal kata berhenti. Seperti penjelasan Danrem Brigjen TNI Andy Setyawan, "meski ada penolakan tapi proyek nasional akan tetap jalan." Bagi pemerintah, penolakan yang muncul sebatas provokasi atau dianggap tidak memiliki hak. Kasus Vincent Kwipalo adalah satu dari sekian wujud bagaimana dalih ketahanan menjadi kekuatan yang memaksa. Sejak awal kedatangannya, perusahaan Murni Nusantara Mandiri mematok tanah adat tanpa sepengetahuan pemilik. "Patok-patok ini perusahaan yang buat," ujarnya tegas. Bersama kerabatnya, Kwipalo menolak melepas tanahnya karena meyakini bahwa menyerahkan tanah berarti kehilangan masa depan bagi dirinya dan generasi mendatang. "Kalau kasih tanah, kami dan anak-cucu mau hidup dari mana? Kami akan melarat," katanya. Karena itu, "tidak sejengkal pun tanah akan kami berikan pada perkebunan." Tidak hanya itu, militer juga sedang menduduki tanah di wilayah adat Kwipalo dengan membangun infrastruktur Yonif Teritorial Pembangunan 817 yang nantinya bertugas melindungi ekstraksi perkebunan. Namun alih-alih didengarkan, Vincent justru dilaporkan ke polisi karena berusaha menghalau eskavator yang masuk merusak tanah adatnya.

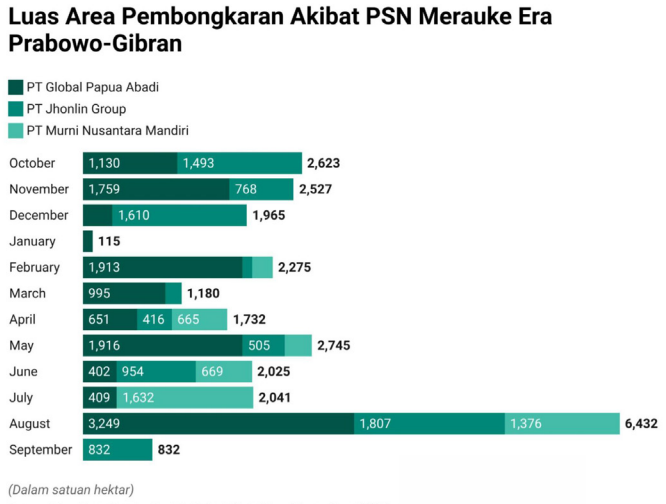
Setahun rezim perang beroperasi di Merauke telah menyebabkan perubahan luar biasa pada biofisik alam. Berdasarkan pemantauan terhadap tiga perusahaan pemegang konsesi, yaitu Global Papua Abadi, Murni Nusantara Mandiri, dan Jhonlin Group, terus membongkar lanskap tanah adat. Dari

proyek ini dimulai hingga September 2025, kerusakan total sudah mencapai 31.508 hektar, dimana 84 persennya terjadi pada masa Presiden Prabowo dan Gibran. Dalam rentang waktu setahun, Global Papua Abadi berkontribusi terbesar terhadap penghancuran hutan dan ekosistem sebesar 12.894 hektar. Sementara, Jhonlin Group berada pada posisi kedua dengan kerusakan mencapai 8.691 hektar. Terakhir, perkebunan tebu Murni Nusantara Mandiri sudah membongkar sejumlah 4.907 hektar sejak Oktober 2024. Tidak menutup kemungkinan pembongkaran ini akan terus meluas di masa depan.

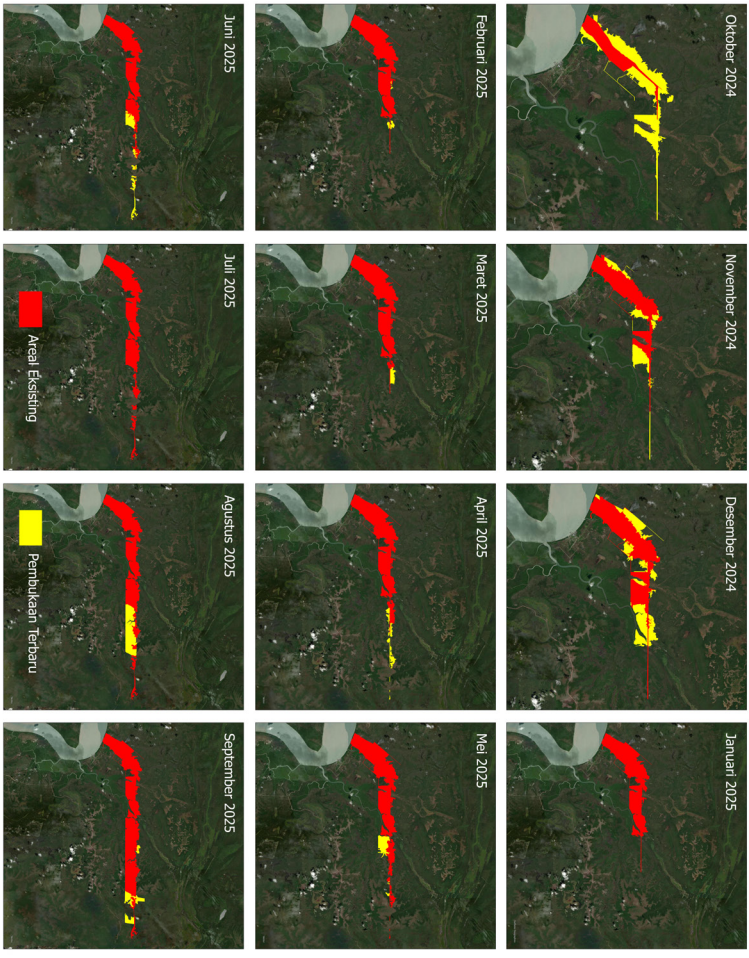


Penghitungan berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak Oktober 2024 - September 2025.
***Source*: Pusaka Bentala Rakyat**
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)

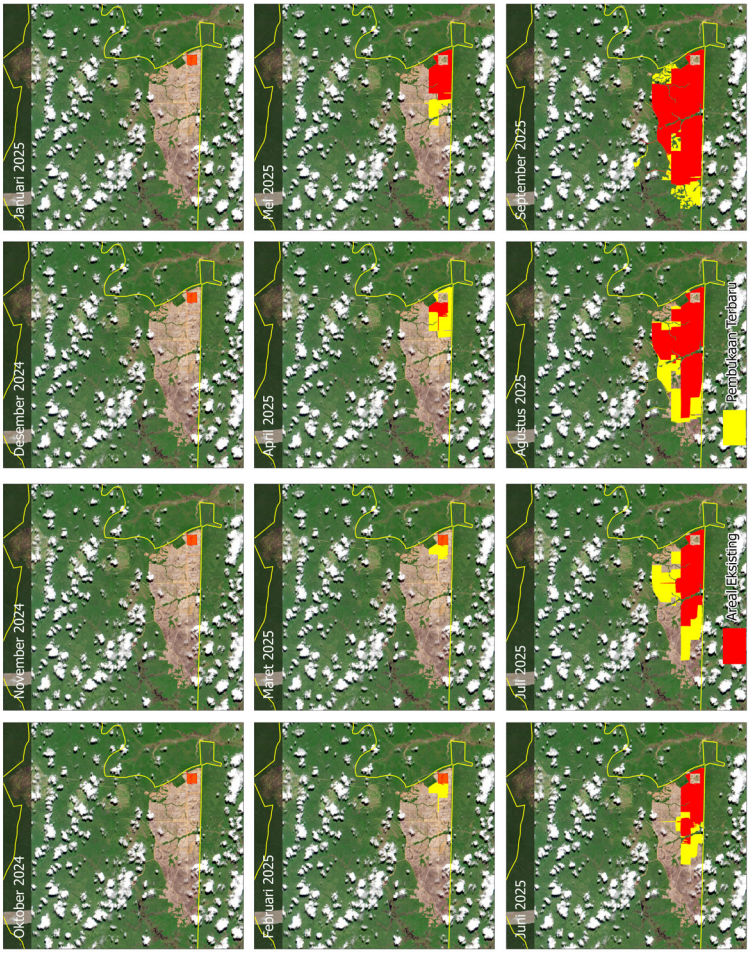
Pemantauan bulanan juga dilakukan untuk melihat variasi pembongkaran tanah adat di Merauke. Data menunjukkan bahwa proyek swasembada pangan dan energi tidak pernah berhenti dengan angka terkecil mencapai 115 hektar pada bulan Januari. Sedangkan selama setahun rata-rata pembongkaran terhitung mencapai 2.207,6 hektar per bulan. Namun peningkatan paling signifikan terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 6.432 hektar atau hampir 3 kali dari rata-rata bulanan. Walau bukan variabel tunggal, kami berhipotesis bahwa peningkatan ini seiring dengan berlakunya Inpres 14 tahun 2025 percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional pada bulan yang sama. Selain percepatan perusakan, kami juga mengamati terjadi akselerasi luar biasa dari aktivitas yang menunjang proyek ini, antara lain: kunjungan pemerintah dan percepatan penyusunan rancangan tata ruang Provinsi Papua Selatan.



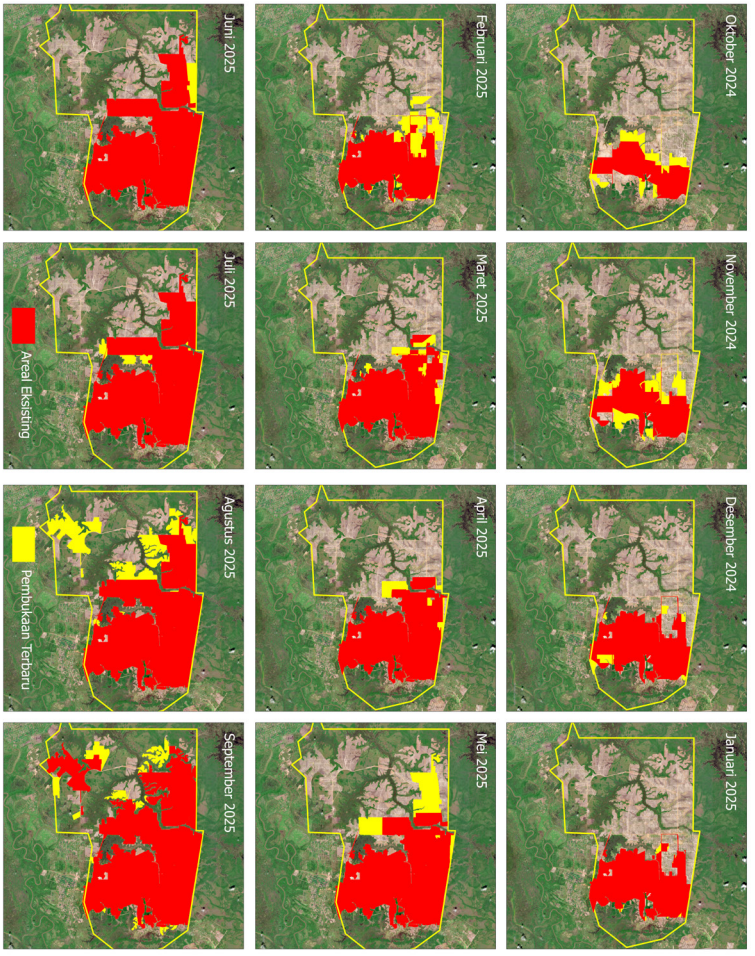
***Source*: Pusaka Bentala Rakyat (Arief Rossi Ramadhan, 2025)**



Setahun Rezim Prabowo - Wanam
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)



Setahun Rezim Prabowo - MNM
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)



Setahun Rezim Prabowo - GPA
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)

Sejak terbitnya Inpres 14 tahun 2025, tim koordinasi segera meninjau langsung perkembangan proyek cetak sawah baru dan berbagai proyek ekstraktif di Selatan Papua. Menko Pangan bertindak sebagai koordinator bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Dirut Pindad serta Kepala Badan Logistik Pertahanan. Perlu menjadi catatan bahwa selain cetak sawah sejuta hektar, pembangunan infrastruktur jalan, serta perkebunan tebu, pemerintah juga merencanakan pembangunan bandara, pelabuhan, perkebunan kelapa sawit, peternakan, serta industri pengolahan kelapa sawit dan industri propelan, dimana seluruh proyek raksasa ini memerlukan tanah dan penataan ulang atas ruang.

Sebagai bagian yang tidak terpisah dari aturan ini, gubernur diperintahkan menyediakan segala fasilitas untuk menopang percepatan, termasuk penyediaan tanah dan perombakan tata ruang. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersurat kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perihal permohonan persetujuan substansi revisi rencana tata ruang wilayah. Namun seluruh areal yang akan dibuka masih dikategorikan sebagai hutan yang menjadi penguasaan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 591 tahun 2025 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan. Dalam SK tersebut, luas hutan yang dikonversi antara lain: Boven Digoel seluas 143.142 ha, Mappi seluas 9.731 ha, dan Merauke seluas 333.966 ha. Tentu perubahan-perubahan ini mengabaikan sama sekali keberadaan penduduk pribumi yang hidup di berbagai wilayah, yakni Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, dan Animha, yang merupakan wilayah adat masyarakat Malind,

Anim, Kanum, Maklew, Yei, dan sebagainya. Akselerasi ini dilakukan demi mencapai satu ambisi besar, yaitu 'swasembada pangan dan energi sesingkat-singkatnya'.

Korban Berjatuhan

Perang selalu menebar teror dan memakan korban. Vincent Kwipalo adalah satu dari sekian jumlah penduduk pribumi yang dapat dimasukkan ke dalam daftar panjang korban beroperasinya rezim perang. Dengan mempertimbangkan semakin meluasnya lanskap penghancuran, muncul sejumlah nama-nama penduduk pribumi yang menyaksikan berhadapan langsung dengan proyek swasembada. Yasinta Moiwend, misalnya, melihat dengan jelas ratusan ekskavator dan tentara menyerbu, menduduki, dan menghancurkan hutan dan tanah adat Maklew menjadi pelabuhan, sawah, dan infrastruktur jalan. "Kami bertanya-tanya ada apa di tempat ini sampai anggota (tentara) segitu banyak," kata Yasinta Moiwend.



Barisan Eskavator Milik Perusahaan Haji Isam di Wanam (Ambrosius Mulait, 2025)

Tuturan serupa juga diungkapkan Liborius Kodai Moiwend yang berasal dari Kampung Wogekel. Dengan bersandal jepit dan baju adat di hadapan persidangan, dia menceritakan bagaimana pemerintah mengorkestrasikan teror yang mengiringi pencurian kekayaan penduduk pribumi.[10]

> "Pertama kali, PSN ini masuk tidak pernah duduk dengan tuan-tuan dusun, seperti pencuri yang masuk ke dusun. Pada tanggal 12 Agustus 2024, PT Jhonlin Group membongkar 300 buah ekskavator lewat dermaga Dwikarya Reksa Abadi, sebuah perusahaan perikanan, dan diarahkan ke tempat yang kami sebut dengan *yauli.* Sejak saat itu gusuran mulai berjalan. Mereka meminta TNI turun lagi supaya bisa jaga keamanan di PSN itu. Jadi mereka bongkar hutan itu, ada juga TNI di sekeliling. Dimana ada pembongkaran hutan, di situ ada TNI pegang senjata. Jadi, masyarakat kami tidak bisa tegur *dorang* karena tentara bawa senjata. Itu yang membuat kami dia," ungkap Liborius saat persidangan gugatan di Mahkamah Konstitusi, RI.

Sementara di konsesi perkebunan Global Papua Abadi, perusahaan memulai pengambilalihan tanah melalui praktik persuasi, manipulasi, pengusiran paksa dan pemindahan keluarga. Sebelum melepas tanah adatnya, Yakobus Mahuze sempat menentang kehadiran perusahaan. Namun, kerabatnya yang lain menganggap kalau tindakan yang diambil Yakobus dan keluarga seperti itu menghalang-halangi. "Kerabat yang lain bilang kalau saya harus mengambil keputusan segera,

10 Sidang Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 yang berlangsung pada Kamis, 11 September 2025.

karena tanah yang akan diambil perkebunan adalah akses masuk," sebutnya. Yakobus menganggap ketika tanah tersebut tidak diberikan akan mengancam keberlanjutan keluarganya. Setelah mendapat ancaman dan tekanan seperti itu, tanah adat tersebut akhirnya diserahkan kepada perkebunan.

Bagi sebagian penduduk pribumi Marind dan Yei-nan, perusahaan perkebunan tebu dapat membawa kemakmuran yang mungkin saat ini belum terasa. Dengan tugu yang dibangun di sejumlah pemukiman penduduk pribumi bertuliskan daftar janji, seperti pemukiman, air bersih, sekolah, infrastruktur jalan, dan lapangan pekerjaan. Selain membawa janji, perusahaan juga mengklaim memberikan sejumlah uang yang jika dihitung hanya sekitar Rp. 300.000 per hektar, sebuah nominal yang nantinya akan terbayarkan kembali dengan lebih besar ke pemilik perkebunan. Kepercayaan atas janji-janji dan rayuan melalui sejumlah uang tunai seperti itulah yang menciptakan paksaan hingga pertikaian di antara kerabat sendiri, seperti pengalaman Vincen Kwipalo dan Yakobus Mahuze.

Di tengah situasi ini, orang Muyu yang bermukim di pinggir kali Maro juga terancam dipindahkan secara paksa. Yulinus Tenot dari Kampung Soa menceritakan, "PT Global Papua Abadi berencana membangun dermaga di kampung yang sekarang kami huni. Jumlahnya sebanyak 75 kepala keluarga." Menurutnya, perusahaan perkebunan menggusur dengan membawa orang yang mengklaim tanah tersebut. Karena alasan itu, orang Muyu yang tinggal di kampung Senayu sejak 1990 terancam terusir dengan alasan pembangunan infrastruktur, yang nantinya mengangkut barang dan komoditas perkebunan. Seluruh cerita ini memperlihatkan bekerjanya sebuah mesin kekerasan yang mengkonsolidasikan kepemilikan properti pribadi dan praktik ekstraksi di kemudian hari.



New Normal (oleh Betty Adii)

Namun, korban yang berjatuhan tidak sebatas penduduk pribumi yang terampas tanahnya, tetapi juga mencakup kerusakan yang tidak terpulihkan dari lanskap biofisik dan kematian keanekaragaman hayati. Tanah yang dulunya dipenuhi tumbuhan menjadi kering, aliran sungai disumbat, dan rawa bergambut telah tertimbun. Tanaman yang sudah tumbuh beregenerasi berubah dengan cepat menjadi tanaman-tanaman bernilai komersial, seperti padi, tebu, dan bahkan kelapa sawit. Kayu yang sudah ditebangi kini bertumpukan atau sebatas alas bagi lajunya ekskavator. Selain itu, penghancuran tanaman juga berdampak langsung terhadap terusirnya berbagai bintang, yang sebagiannya menjadi sumber protein yang tersedia secara gratis. Dari sini muncul semacam paradoks, dimana rezim perang menggunakan diskursus ketahanan pangan dan energi, tetapi kenyataanya menciptakan hubungan ketergantungan baru pada produksi, distribusi, serta konsumsi komoditas pangan dan energi.

Desersi dan Perang Rakyat

Setelah mengungkapkan kenyataan bahwa perang tidak pernah benar-benar selesai, Michael Hardt dan Sandro Mezzadra menawarkan apa yang disebut dengan desersi. Desersi dalam istilah militer dapat diartikan sebagai penarikan diri secara total dari struktur kemiliteran. Sementara dalam konteks melawan rezim perang, desersi menjadi strategi politik-praxis, yaitu penarikan diri kolektif dari struktur yang memproduksi/menjaga rezim tersebut, termasuk struktur militer, logistik, ekonomi keamanan, dan bahkan struktur afiliasi ideologis yang mendukungnya. Mao Tse-Tung menyebutnya dengan lebih lugas sebagai pemberontakan atau perang rakyat.

Tentu ini bukan sekedar gertakan, melainkan sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena pemberontakan paling keras dan kekacauan paling serius selalu terjadi di tempat-tempat di mana para penguasa melakukan kekejaman terburuk.[11] Di Selatan Papua, kekerasan dan penghancuran sistematis terhadap penduduk pribumi masih terus berlangsung dan meluas, serta dibenarkan demi ambisi swasembada pangan dan energi. Setelah setahun berkuasa, rezim perang Prabowo dan Gibran telah merampas kekayaan penduduk pribumi dengan cara menggusur hutan, mengusir hewan buruan, meratakan tempat-tempat sakral bersejarah, serta menebar teror melalui militer bersenjata. Begitu juga sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber mata pencaharian dan kemandirian pekerjaan dilucuti. Di tengah derita dan penghinaan yang jelas inilah, pemberontakan dan perang rakyat memperoleh legitimasinya.

Dengan perjuangan luar biasa dari penduduk pribumi dan solidaritas rakyat yang bercorak internasionalis semakin menguat hari demi hari. Pendirian palang adat dan dibeberapa teritorial adat lain diekspresikan dengan salib merah menjadi penanda nyata bahwa perang rakyat untuk merebut kembali kendali teritorial telah semakin jelas. Ledakan demonstrasi besar-besaran di berbagai penjuru, mobilisasi gerakan buruh, insureksi, boikot, pendudukan ulang tanah, serta percakapan yang tidak jarang meruncing tajam masih berlangsung, sekalipun di tengah represi militer dan pemenjaraan. Kenyataan seperti ini menjadi penanda penting bahwa perang rakyat masih dan akan terus berdenyut.

11 Mao Tse-Tung. (1927). *Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.*

Referensi

Agamben, G. (1988). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life.* California: Stanford University Press.

Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.

Angus, I. (2023). The War Against the Commons: Dispossession and Resistance in the Making of Capitalism. New York: Monthly Review Press.

Antara. (2023). TNI dan Kementan teken MoU perkuat kerja sama bidang pertanian.

Antara. (2024). Wamenhan Turut Tinjau Lahan Pengembangan Food Estate di Merauke.

Antara. (2025). Komisi VI Harap Agrinas Palma Jadi Motor Kemandirian Energi Indonesia.

Arango Vásquez, L. (2024). *Indigenous peoples, commons and the challenge of sustaining life amid capitalist land grabs*. The Journal of Peasant Studies, 1–28.

Aritonga, M., Irfani, F. (2025). Fear and Raiders in Papua: How thousands of Indonesian soldiers are forcing through a vast agricultural project in indigenous lands and forests. The Gecko Project.

Bhattacharyya, T. (2025). Tidak Ada Gencatan Senjata di Tanah Rampasan: Pembebasan, Bukan Zionisme Liberal. IndoProgress.

Bräuchler, B. (2025). Golden Indonesia 2045: *Neoliberal Development Policies and Environmental Journalism.* Journal of Current Southeast Asian Affairs, 0(0).

De Boever, A. (2009). *Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentality, Economy.* Law and Critique, 20(3), 259–270.

de Moura Costa Matos, A.S. (2023). State of Exception. Dalam Sellers, M., Kirste, S. (eds) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer, Dordrecht.

Detik. (2025). KSAD Teken MoU Ketahanan Pangan untuk Kembangkan Ekosistem Pertanian.

Giorgio, D. E., (2024). *A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers.* Journal of Agrarian Change, 24(1)

Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). *A global war regime*. Sidecar.

Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and democracy in the age of empire.* Penguin Press.

Haripin, M. (2020). *Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war*. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). T*he Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara*. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). *Quasi-civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency.* Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Sebastian, L. C. (Eds.). (2022). *Military modernisation and civil-military relations in Indonesia.* Palgrave Macmillan.

Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). *Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics.* The Military and Society. Springer, Cham.

Honna, J. (2013). *The Army and the Indonesian Transition.* Routledge Handbook of Contemporary Indonesia.

Honna, J. (2022). *Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military's Non-Defence Role.* ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Humphreys, S. (2006). *Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben's State of Exception.* The European Journal of International Law, Vol. 17 No. 3.

Jun, H. (2024). *2024 Indonesian Presidential Election: How Prabowo Won.* Asia-Pacific Review, 31(2), 105–116.

Jong, N. H. (2024). Kegagalan di Masa Lalu Tidak Dapat Menghentikan Indonesia dari Penebangan Hutan dan Lahan Adat untuk Pertanian. Mongabay.

Karl, N. & Habtom, T. (2023). *An Ecological State of Exception: Applying Carl Schmitt to Climate Change.*

Kemenhan. (2024). Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menhan Sjafrie Fokus Melanjutkan dan Mengembangkan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara.

Kemenhan. (2024). Tiba di Merauke, Wamenhan M. Herindra Tinjau Panen Raya Food Estate di Papua Selatan.

Mao Tse-Tung. (1927). Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.

Mezzadra, S. (2011). *The Topicality of Prehistory: A New Reading of Marx's Analysis of "So-called Primitive Accumulation*." Rethinking Marxism, 23(3), 302–321.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2022). *The capitalist virus*. Politics, 44(2), 188-202.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2024). *The Rest and the West: Capital and Power in a Multipolar World*. Verso Books.

Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.

Paju Dale, C. J. (2025). Kuliah Umum: Gerakan Palang Adat dan Salib Merah: Kolonialisme dan Kapitalisme Hijau, Kekristenan Pribumi, dan Determinasi Masyarakat Adat di Tanah Papua. Youtube Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). PSN Merauke II: Perampasan Tanah, Deforestasi, dan Ancaman Etnosida. Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). Catatan Akhir Tahun 2024: Ketidakadilan Ekstraktivisme. Pusaka Bentala Rakyat.

Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). *A Most Militarised Cabinet*. New Mandala.

RRI. (2025). Menhan Tinjau Rencana Pengembangan Biodiesel di Papua Selatan.

RRI. (2025). Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora Tiba di Merauke.

Savitri, L. A. (2025). Nekropolitik Negara: Militerisasi Produksi Pangan di Tanah Malind Anim. Pusaka Bentala Rakyat.

Supriatma, M. (2025). Expansion of the Indonesian Army: A Creeping Dual Function? Fulcrum.

Solidaritas Merauke. (2025). Deklarasi Solidaritas Merauke.

Tempo. (2025). Jika Tentara Mengelola Kebun Sawit Bermasalah Lewat Agrinas Palma.

Tempo. (2025). Pesan Prabowo untuk Kapolri dan Panglima TNI saat Tinjau Kebun Sawit Ilegal.

The Editors. (2022). *Current Data on the Indonesian Military Elite: October 2014–December 2021. Indonesia 114*, 99-223.

TNI AD. (2024). Kasad: Batalyon Penyangga Daerah Rawan Dukung Keamanan dan Percepatan Pembangunan.

The First Year of the Prabowo-Gibran War Regime

Table of Contents

Introduction **(59)**

What is a War Regime? **(60)**

The Militarization of Power **(63)**

National Security as a Pretext
for Land Dispossession **(78)**

Casualties of
the War Regime **(93)**

On Desertion and
the People's War**(99)**

References **(101)**

Introduction

"We will achieve food and energy self-sufficiency in the shortest possible time," declared Prabowo in his inaugural speech as President of the Republic of Indonesia. He added, "We must not depend on food sources from abroad." The same principle, he argued, applies to energy. "In a time of global tension when wars could break out anywhere, we must prepare for the worst. Other countries will always act in their own interests," he said, framing his administration's agenda around the language of crisis and survival. Through this rhetoric, he made clear his conviction that Indonesia must produce its own food and energy to secure self-sufficiency.

From the outset, food and energy self-sufficiency stood at the top priority of his political vision. In his campaign's vision and mission document, Asta Cita, self-sufficiency appeared first among seventeen national priorities. After winning an election marked by intense political maneuvering, President Prabowo and Vice President Gibran reaffirmed this ambition in the draft of the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan. Almost every ministry was assigned to work toward this goal by the end of the administration's term. Among the key figures were Coordinating Minister for Food Affairs Zulkifli Hasan, Minister of Agriculture Amran Sulaiman, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Nusron Wahid, Minister of Defense Sjafrie Sjamsoeddin, as well as Indonesian National Armed Forces (TNI).

While food and energy insecurity are not new concerns, they have dominated the agendas of many governments since the 2007–2008 financial crisis, the global pandemic, and the outbreak of the Russia-Ukraine war. These overlapping crises have profoundly shaped political discourse and policy-making

worldwide. Different governments have responded in different ways, from Trump's neo-Malthusian approach to the more diverse approaches seen in the European Union, China, and Indonesia. Trump's approach, for instance, centered on boosting domestic production, tightening immigration, and declaring a "national energy emergency" that rolled back environmental regulations restricting fossil fuel extraction. Meanwhile, the European Union, suffering acute disruptions due to the Russia–Ukraine war, opted for energy-saving measures and greater openness in food commodity markets. In a similar vein with Trump's policies, Prabowo has persistently framed food and energy issues as a matter of national defense.

This text focuses on the first year of the Prabowo-Gibran administration. We argue that the government's crisis response articulated through the discourse of national resilience emerges from a particular logic, in which war and permanent threats seep into governance, the economy, and everyday life. In this sense, Indonesia is entering, or have already entered, what Michael Hardt and Sandro Mezzadra describe as a "war regime". Drawing from the food and energy self-sufficiency project in Merauke, we argue that the operation of the current war regime has had serious consequences for Indigenous communities, such as land dispossession, fear induced by the deployment of thousands of troops, and the criminalization of Indigenous people.

What is a War Regime?

The concept of a war regime refers to Michael Hardt and Sandro Mezzadra's essay "A Global War Regime", which describes a global political order where the logic of war—sur-

veillance, regulation, control of mobility, and disciplining of populations—has become the primary means for organizing the economy, borders, and social life, even in the absence of open armed conflict. This concept arises from their observation of the current global conjuncture marked by reactionary political tendencies that fuse militarism with socio-economic repression. Across the world, political leaders frequently invoke the rhetoric of war that materializes in the geopolitical landscapes, indicating war is not a relic of the past but an ongoing social relation constantly taking new forms.[1]

In another work, Michael Hardt and Antonio Negri distinguish between wars of the past and those of the contemporary. For them, tracing the evolution of warfare helps identify both continuities and ruptures within global conflicts. The First and Second World Wars, for instance, were temporally and spatially bounded conflicts between nation-states, though sometimes spread beyond national borders. They typically ended in surrender, victory, or truce. Contemporary warfare, by contrast, manifests in metaphorical campaigns such as the "War on Terror", "War on the Pandemic", or "War on Hunger". These propagandistic formulations can expand anywhere and persist indefinitely. Alongside these spatial and temporal shifts, contemporary war insinuates enemies with far greater flexibility, targeting anyone perceived as oppositional. Despite these differences, the use of power and violence remains deeply entrenched.

1 Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). *A global war regime*. Sidecar.

Integral to the rise of the contemporary war regime is the expanding role of military and quasi-civilian governance structures, which have taken the lead in orchestrating legitimized forms of power and violence. For such power to endure, the constant presence of an enemy and the specter of chaos must be maintained. Before President George W. Bush's administration launched the "War on Terror", for example, the enemy had already been reconstructed as a demonic figure embodied by Al-Qaeda and the Taliban. Under this pretext, the United States positioned itself as a "heroic rider of war" bearing the banner of national and global security, thereby legitimizing military interventions abroad, the reorganization of geopolitical orders, and the surveillance of entire populations. Similarly, the COVID-19 pandemic became a pivotal moment in normalizing the global reach of the war regime. Through the rhetoric of a "War on COVID-19", national governments, including Indonesia, reaffirmed the military's role in public health operations, vaccine distribution, and enforcement of social restrictions.[2]

The consolidation of a permanent war-like condition has also redefined food and energy as strategic resources to be secured amid ongoing instability. As in earlier periods, food and energy security are now framed as matters of national defense, issues whose neglect could easily provoke political instability. This sense of urgency, in turn, has provided justification for the military's growing involvement in food and energy production, even in the everyday routines of civilian life.

2 Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). *Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics.* The Military and Society. Springer, Cham.

The Militarization of Power

Before Prabowo and Gibran's 58 percent landslide victory, many had voiced concern over Indonesia's growing turn toward militarized politics, given Prabowo's background as a retired general with a record of human rights violations. Throughout the 2024 presidential campaign, Prabowo consistently cast himself as a wartime leader, delivering fiery speeches filled with warnings that the nation stood on the brink of food and energy crises, and an increasingly unstable geopolitical order. Amid these overlapping crises, he pledged achieving food and energy self-sufficiency would be his top priority once elected.

After the election, those earlier concerns began to materialize. His inaugural speech before the People's Consultative Assembly offered a clear glimpse into the emerging war regime of his administration, one in which driven by an urgency to reach self-sufficiency in the shortest possible time. To accomplish these ambitious goals, he envisioned a system modeled on wartime discipline; a structure built on obedience, hierarchy, and centralized command. It was therefore unsurprising that the composition of his cabinet included a significant number of military figures. Adhi Priamarizki and Muhamad Haripin identified at least 23 retired officers and one active-duty military officer in strategic government posts. As they note, these appointments were not merely about maintaining political stability and consolidating power, but also repositioning the military as a key actor in broader national development.[3]

3 Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). *A Most Militarised Cabinet*. New Mandala.



El-Maut (by Michael Yan Devis)

Under Prabowo's leadership, the military and quasi-civil institutions, most notably the Ministry of Defense, have become his strongest allies to achieve the ambitious food and energy self-sufficiency project.[4] During a working meeting with Commission I of the House of Representatives, Defense Minister Sjafrie stated his focus on continuing and expanding the development of national defense capabilities. "The current strategy of the Ministry of Defense," he explained, "is to continue and advance the development of the national defense strategy initiated by President Prabowo Subianto during his previous tenure as Minister of Defense." This continuity refers to Prabowo's earlier initiatives in coordinating food estate projects, expanding territorial commands, and developing territorial battalions.

The construction of a war regime depends on two material preconditions: the production of threats to national sovereignty and the presence of military or quasi-civilian authorities capable of exercising legitimized power in the name of safeguarding the nation-state. To cultivate this sense of crisis, Prabowo repeatedly framed food and energy security as inseparable from the broader issue of national survival. "Food is sovereignty. Food is the life and death of the Indonesian nation. Food is a matter of independence, of our survival as a people. If we aspire to become a developed country, food must first be secured," he said in a teleconference on February 3, 2025. He underscored the need for strict local oversight, and instructed the military, police, and agricultural agencies to sta-

4 Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). *Quasi-civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency. Asian Journal of Comparative Politics, 8*(1), 164-183.

bilize rice prices and prevent market speculation. Nowhere is this dynamic more visible than in Merauke, where the Ministry of Defense has been appointed as the direct operator, working alongside extractive businessman Haji Isam to open new rice fields and build agricultural infrastructure.

By equating food and energy security with national defense, the government has legitimized the Ministry of Defense's expanded presence as a necessary intervention in times of crisis. The "NKRI Harga Mati" slogan serves as an ideological vehicle for extending military operations beyond conventional warfare.[5] Legally, this expansion rests on the doctrine of Military Operations Other Than War (OMSP), whose scope was broadened following revisions to the Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (UU TNI).[6] The military recalibrated its role within a democratic setting without losing institutional autonomy, normalizing its presence in civilian spheres, extending territorial command structures to the smallest administrative units, and thereby laying the groundwork for the Prabowo-Gibran war regime.

Beyond the OMSP legal framework, there are at least three other mechanisms used to expand the military role in peacetime: Presidential Instructions/Regulations, verbal direc-

5 Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). *The Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara*. Routledge.

6 Haripin, M. (2020). *Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war.* Routledge.

tives, and military initiatives.[7] The Presidential Instruction/ Regulations provide as an executive instrument to activate OMSP-related operations without parliamentary approval. The military is typically integrated through the framework of "technical and security support" rather than direct combat mandates, justified under the ideological discourse of national resilience. The following are several key Presidential Instructions/Regulations concerning food and energy self-sufficiency:

No	Regulation	Sector	Main Directives	Potential/ Pattern of OMSP	Political & Ideological Implications
1.	Presidential Regulation No. 192/2024 on the Ministry of Agriculture	Food	Establishes a new ministerial structure, strengthening directorates on food security and sustainable agriculture	Indirect involvement, but opens channels for coordination between the Ministry of Agriculture and the village supervisory non-commissioned officers (Babinsa) in farmer assistance programs	Reaffirms the logic of "national resilience" as the foundation of strategic agricultural programs

7 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). *Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia.* In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

2.	Presidential Instruction No. 2/2025 on Acceleration of Construction, Rehabilitation, Operation, and Maintenance of Irrigation Networks to Support Food Self-Sufficiency	Food	Orders the acceleration of irrigation construction and maintenance to support rice and corn self-sufficiency	Babinsa and district military commands (Kodim) assigned to assist field coordination, including farmer support and infrastructure monitoring	OMSP manifests as "developmental support", strengthening territorial command structures
3.	Presidential Instruction No. 10/2025 on Acceleration of Corn and Soybean Self-Sufficiency	Food	Cross-ministerial instruction to increase national corn and soybean production	Military involvement in logistics and land-security support in agricultural zones	Reinforces the military's role in rural economies, revives the Babinsa's role as facilitators of agricultural production
4.	Presidential Instruction No. 11/2025 on Acceleration of Regional Road Connectivity	Food & energy	Expands regional road infrastructure to improve the distribution of agricultural and energy commodities	Potential deployment of Army Corps of Engineering (Zeni TNI) for construction of local roads and bridges	Revives the military's "developmental function" of the New Order era which justified through technocratic legitimacy

5.	Presidential Instruction No. 14/2025 on Acceleration of National Food, Energy, and Water Self-Suffiency Zone Development	Cross-sectoral	Mandates the establishment of integrated self-sufficiency zones and digital monitoring systems involving multiple ministries	The Ministry of Defense and TNI are tasked with securing strategic national projects, logistics, and social stabilization in project areas	Merges the ideas of "national resilience" and "resource sovereignty"; opening avenues for the militarization of development
6.	Presidential Decree No. 19/2025 on the Coordinating Team for Acceleration of National Food, Energy, and Water Self-Suffiency Zone Development	Institutional	Forms a cross-ministerial coordination team to oversee the implementation of Presidential Instruction No. 14/2025	Involves coordination with the Ministry of Defense	Strengthens executive control over strategic national policies without legislative oversight, extending security politics into the sphere of national development
7.	Presidential Regulation No. 5/2025 on the Regulation of Forest Areas	Forestry	Establishes a Forest Area Regulation Task Force (Satgas PKH) to regulate mining, plantations, and other activities within forest zones that threaten state control over land and revenue	Satgas PKH led by Minister of Defense Sjafrie Sjamsoeddin, the Attorney General, TNI Commander, and Polri Chief, with a potential military mobilization	Satgas PKH institutionalizes military involvement in forestry and agrarian affairs



A second mechanism operates through verbal directives, which serve as informal precedents legitimizing military involvement. President Prabowo and Vice President Gibran have repeatedly used coordination meetings and public addresses to advance the narrative of food and energy as pillars of national security. These statements, widely covered by the media, function as de facto orders that guide bureaucratic behaviour and shape public discourse alike.

Elegi Tanah Marind
(by Costan Raharusun)

Statement	Where & When	Key Aspects	Indications of Military Involvemen
“During the leadership meeting, the President gave a briefing that he is very concerned about food security issues,” said Army Chief of Staff Gen. Maruli Simanjuntak.	Video conference to senior Army officials during the Army leadership meeting at Balai Kartini, South Jakarta, on January 31, 2025.	Prabowo instructed the TNI to prioritize food security efforts to strengthen regional food reserves.	General Maruli immediately initiated food security programs, including converting idle lands across Indonesia into farmlands and regional food storage sites.
“I remember being accompanied by Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo and TNI Commander Gen. Agus Subiyanto, why are we involved in food matters? Because food is the foundation of a nation,” said President Prabowo during a cabinet meeting.	Cabinet session on May 5, 2025.	Prabowo explained the rationale for involving the military and police in food security.	The military and police have been involved in addressing drought. He explained that drought issues can be resolved through water distribution, given the abundance of rivers across Indonesia. He also cited joint efforts in addressing drought by utilizing Indonesia’s rivers and installing 80,000 water pumps nationwide.
“We are collaborating and signing a commitment to achieve self-sufficiency as directed by the President of the Republic of Indonesia,” said Minister of Agriculture Amran Sulaiman.	Food Self-Sufficiency Coordination Meeting with the Army in Jakarta on December 12, 2024.	The Minister of Agriculture worked with the Army in coordinating field readiness for food self-sufficiency.	Direct military involvement in implementing the government’s food self-sufficiency agenda.

“President Prabowo Affirms Energy and Food Are the Keys to National Sovereignty”	Opening of the 49th Annual Convention and Exhibition of the Indonesian Petroleum Association (IPA Convex), in ICE BSD, Tangerang, on May 21, 2025.	Prabowo declared that a nation’s sovereignty depends on its ability to produce its own food and energy, highlighting the Forel & Terubuk oil and gas projects as milestones in achieving energy self-sufficiency.	Food and energy are conceptualized as pillars of “national security and sovereignty”. While the statement did not explicitly mention the military, it lays ideological groundwork for legitimizing future OMSP involvement.
“Prabowo: I Will Not Rest Until Indonesia Achieves Food Self-Sufficiency”	National corn harvest festival in Bengkayang, West Kalimantan on June 8, 2025.	Prabowo reaffirmed his commitment to food self-sufficiency, stating that every province and island must be self-reliant in food production.	Collaboration of National Police and TNI in implementing food self-sufficiency.
“The military has been involved for several years now, and we will continue to involve them," said Prabowo.	Nationwide corn harvest festival in Bengkayang, West Kalimantan on June 5, 2025.	Prabowo stated that food self-sufficiency is key to public security; the military and police must be directly involved in managing food issues to maintain stability.	Directly links food programs to national security; the military and police are essential actors in their implementation.

The third mechanism, closely linked to the previous two, operates through the issuance of Memorandums of Understanding (MoUs) or Cooperation Agreements (PKS). However, before these formal arrangements are signed, there is often an informal consensus initiated either by the military or other state institutions that signals the activation of Military Operations Other Than War (Operasi Militer Selain Perang, OMSP). For instance, Lt. Gen. Tandyo Budi Revita, Deputy Army Chief of Staff, instructed regional military commanders to deploy their combat units within in support of the government's food self-sufficiency program. The Ministry of Agriculture, as the leading sector of the program, is thus able to formally involve the TNI, particularly the Army, in assisting new rice fields establishment across regions.

During President Jokowi's administration, the use of MoUs expanded dramatically, with reports indicating that the TNI signed more than a hundred agreements with civilian institutions.[8] These arrangements allowed the military to intervene in civilian sectors without the need for a formal emergency declaration or military operations, thus granting TNI commands an active role in the implementation of food and energy self-sufficiency projects. Within these frameworks, the military was assigned with planning self-sufficiency zones, deploying Territorial Development Infantry Battalions to mobilize equip-

8 Mengko, D.M., Rosadi, A.F. (2025). *Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia.* In Haripin, M., Priamarizki, A., Sebastian, L.C. (eds) Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia. Palgrave Macmillan, Singapore.

ment and logistics, establishing command posts and supporting infrastructure, and overseeing regional security. Several of these MoUs and PKS are listed below:

Date of Issuance	Mechanism	Scope	Key Aspects	Military Involvement
December 4, 2023	MoU between the the TNI Commander and the Minister of Agriculture	National	Strengthening TNI and Ministry of Agriculture collaboration in reviving food self-sufficiency programs, optimizing idle land, and providing farmer assistance	Involvement of Babinsa, Zeni Corps, and territorial commands in land clearing and fertilizer/seed distribution
February 12, 2025	MoU between the TNI Commander, Ministry of Forestry, and Ministry of Environment	National	Cooperation on strategic programs involving the TNI, Ministry of Environment, and Ministry of Forestry	Joint activities in forest and land rehabilitation, wildfire prevention, biodiversity conservation, forest protection and law enforcement, human resource development, infrastructure utilization, social forestry, and the use of forest areas for national defense and resilience purposes
March 8, 2024	PKS between the Army and the Ministry of Agriculture: Utilization of Major Rivers and Water Pumping for Agriculture	National	Optimization of agricultural land through water pumping and river utilization to expand rice planting areas	Babinsa and Zeni Corps directly participate in building irrigation infrastructure and pumping operations

March 18, 2025	MoU between the Merauke Regency Government and Military Resort Command (Korem) 174/ ATW	Merauke, South Papua	Optimization of 5,000 hectares of agricultural land to support food self-sufficiency and the Merauke Food Estate	Korem 174/ ATW is tasked with deploying heavy equipment, manpower, and ensuring project security
August 19, 2025	MoU between the Ministry of Defense and PT Pertamina Gas Negara (PGN)	National	Strengthening defense and energy cooperation for gas distribution and protection of national energy facilities	The TNI, through the Ministry of Defense, provides security, logistical, and surveillance support for vital energy infrastructure
October 11, 2025	MoU between the TNI Vice Commander and the President Director of PT Agrinas	National	Operational collaboration for Merah Putih village cooperatives	Collaboration on the establishment of 80,000 Merah Putih village cooperatives across Indonesia
October 12, 2025	PKS between the Army, Ministry of Agriculture, and PLN in Merauke (Telagasari, Kurik)	Merauke, South Papua	Collaboration in providing electricity for agricultural areas and electric water pumps in self-sufficiency zones	The Army assists with field implementation, labor deployment, and the security of PLN facilities

One element closely intertwined with the Prabowo-Gibran's war regime is the establishment of the The Forest Area Regulation Task Force (Satgas PKH) and its connection to Agrinas Palma Nusantara. The task force is authorized to regulate and reclaim forest areas used contrary to their designated purposes and is legally empowered to deploy military forces when necessary. This so-called "war on illegal forest activities" is led by Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin, together with the Attorney General, the TNI Commander, and the National Police Chief. "The establishment of the Satgas PKH marks a strategic breakthrough in restoring order and rehabilitating forest functions," stated Minister Sjafrie during the handover ceremony for the second phase of reclaimed forest lands. To date, the Task Force has reclaimed a total of 3,312,022.75 hectares of forest land across Indonesia. Approximately 915,206.46 hectares have been transferred to relevant ministries, most of which have been allocated to Agrinas Palma Nusantara.

Agrinas Palma Nusantara, a state-owned enterprise, has been assigned to manage oil palm plantations and biodiesel production as part of the government's national energy resilience agenda. "PT Agrinas Palma Nusantara is the state-appointed entity tasked with productively managing reclaimed forest lands," said Minister Sjafrie. Formerly known as PT Indra Karya, a construction company, Agrinas Palma Nusantara was swiftly transformed into a major plantation enterprise, much of its land assets derived from areas seized by the task force. During one of his visits to South Papua, the Director of Agrinas Palma Nusantara accompanied Minister of Defense, Minister of Forestry, Minister of Agriculture, Minister of Public Works,

the Presidential Special Staff for Infrastructure, the Army Chief of Staff, the Deputy Army Chief of Staff, and the Head of the Defense Facilities Agency, to inspect a oil palm-based biodiesel development site in Boven Digoel. The Minister of Defense described the visit as part of the government's broader strategy to strengthen national energy security.

The reproduction of power within the war regime is further reinforced through the expansion of territorial control. In August 2025, President Prabowo inaugurated six new Regional Military Commands (Kodam), twenty Territorial Development Infantry Brigades (Brigif TP), and one hundred Territorial Development Infantry Battalions (Yonif TP) at Suparlan Airbase, West Java. The newly established Kodam are located in strategically vital regions deemed critical to national security: Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau and Riau Islands), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Padang and Jambi) Kodam XXI/Radin Inten (Lampung and Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Central and South Kalimantan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Central and West Sulawesi), and Kodam XXIV/Mandala Trikora (Merauke, South Papua).

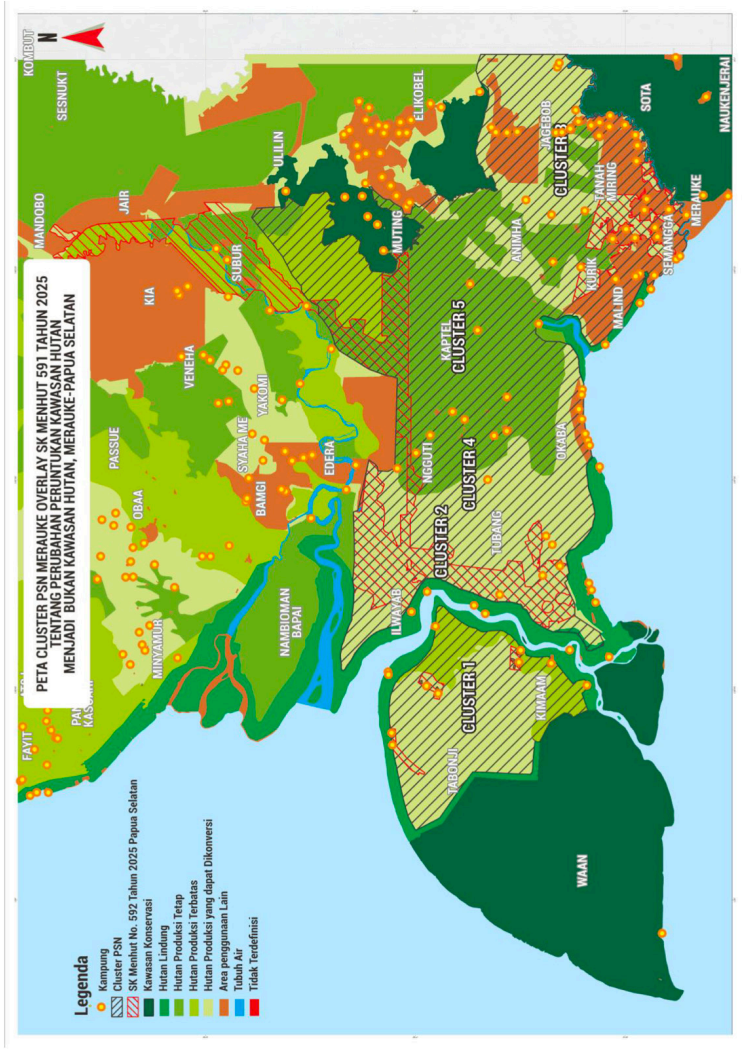
The Territorial Development Infantry Brigades and Territorial Development Infantry Battalions are formed as defense units designed to support national development. Beyond their combat capability, these troops receive training in agriculture, healthcare, and construction. "Essentially, these are infantry battalions," said Minister Sjafrie. "They must have firing ranges and soldiers skilled in marksmanship. But at the same time, they can be mobilized as agricultural, medical, or construction

battalions depending on the nation's needs." Both units are integrated with the Regional Support Infantry Battalions (Yonif PDR) to ensure security and development in conflict-prone areas. Existing battalions include Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha (Keerom), Yonif 802/Wimani Mambe Jaya (Sarmi), Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri (Boven Digoel), Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha (Merauke) and Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap (Sorong). Through these expanding territorial forces, President Prabowo has accelerated his consolidation of command and control across the Indonesian archipelago.

National Security as a Pretext for Land Dispossession

Since his inaugural address, Prabowo has placed food and energy self-sufficiency at the forefront of his national agenda. As Jun Honna (2002) notes, the discourse of national security enables practices such as land dispossession and deep military involvement in civilian affairs. In Merauke, the Prabowo-Gibran war regime has mobilized the entire apparatus of the state to compel Indigenous communities to surrender their ancestral lands, streamline regulations, reallocate state budgets, redraw spatial plans, and deploy thousands of soldiers whose presence enforces compliance and accelerates project implementation.

Under the rhetoric of national resilience, approximately 2.6 million hectares of land in Merauke are being transformed into the National Strategic Project (PSN). The Merauke PSN consists of three major components. First, the Agricultural Land Optimization Project (Oplah), focusing on mechanized farming, irrigation canal construction, and the distribution of agricultural machinery across six districts: Kurik, Tanah



Map of PSN Clusters Overlaid with Ministerial Decree No. 591/2025

Miring, Merauke, Semangga, Jagebob, and Malind. This initiative covers 40,000 hectares, with plans to expand to 100,000 hectares, and is jointly managed by the Ministry of Agriculture, local governments, the TNI, and students from the Agricultural Development Polytechnic (Polbangtan). Second, the New Rice Field Development Project jointly overseen by the Ministry of Defense and the Ministry of Agriculture, encompassing one million hectares of land and involving the construction of 135.5 kilometers of roads across Ilwayab, Ngguti, Kaptel, and Muting districts. Third, the Sugarcane and Bioethanol Plantation Project managed by ten private companies, which spans 563,661 hectares. The allocation of these vast land concessions functions as a politico-legal strategy through which the state asserts territorial boundaries, consolidates control, and authorizes land transfers. With just a single "stroke of the pen," customary landowners are recast as trespassers on their own land.[9]

To provide a clearer view of these developments, we compiled a timeline tracing key milestones in the food and energy self-sufficiency across South Papua, covering public statements, visits, regulatory issuances, spatial planning adjustments, and on-the-ground operations. Within just one year, the food and energy self-sufficiency program has emerged as a defining feature of the Prabowo-Gibran war regime.

9 Giorgio, D. E., (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. *Journal of Agrarian Change, 24*(1)

Date	Actor(s)	Location	Description
April 17, 2024	Deputy Minister of Defense M. Herindra	Semangga District/KSPP I Merauke	Field visit to inspect the grand harvest and assess progress in developing the Central Food Production Area.
May 17, 2024	Minister of Investment/Head of BKPM Bahlil Lahadalia	Ngguti Bob Village, Tanah Miring District, Merauke	Inspected Global Papua Abadi's sugarcane plantation.
October 7, 2024	Deputy Minister of Defense M. Herindra	Jakarta	Chaired a coordination meeting on Food Security Development in Merauke, South Papua.
October 13, 2024	Deputy Minister of Defense M. Herindra and Minister of Agriculture Amran Sulaiman	Wanam, Merauke, South Papua	Follow-up inspection of the Central Food Production Area and technical coordination discussions with the Ministry of Agriculture.
October 18, 2024	Secretary of the Defense Facilities Agency (Baranahan) Rear Admiral TNI Mochamad Taufik Hidayat	Jakarta	Follow-up meeting on Food Security Development in Merauke Regency, emphasizing the need for close coordination between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the Ministry of Home Affairs in integrating forest area conversion with regional spatial planning (RTRW).
October 20, 2024	People's Consultative Assembly (MPR RI)	Jakarta	Convened a plenary session for the inauguration of President Prabowo and Vice President Gibran. In his inaugural address, Prabowo outlined his priority agenda to achieve food and energy self-sufficiency amid global uncertainty.

October 21, 2024	President Prabowo	Jakarta	Formed the Red and White Cabinet that is widely regarded as militaristic due to the high proportion of active and retired military officers. Appointed Sjafrie Sjamsoeddin as Minister of Defense and Muhammad Herindra as Head of the State Intelligence Agency.
November 3, 2024	President Prabowo	Merauke, South Papua	First presidential visit to review the progress of food self-sufficiency programs (demonstration plots, harvesting, land optimization, and infrastructure). Accompanied by the Ministers of Agriculture and Defense, the Head of State Intelligence Agency, the TNI Commander, the Acting Governor of South Papua, and businessman Haji Isam.
November 10, 2024	Territorial Development Infantry Battalions	Merauke, South Papua	Deployment of three Territorial Development Infantry Battalions, Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, and Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri, to support the government's food security program.
November 25, 2024	Minister of Defense	Jakarta	Highlighted national security concerns related to food and energy self-sufficiency during a hearing with Commission I of the House of Representatives, and announced plans to establish 100 new territorial battalions in 2025.
January 30, 2025	President Prabowo	Jakarta	Officially issued Presidential Instruction No. 2/2025 on the Acceleration of Construction, Rehabilitation, Operation, and Maintenance of Irrigation Networks to Support Food Self-Sufficiency (signed February 4, 2025).

February 10, 2025	President Prabowo	Jakarta	Issued Presidential Regulation No. 12/2025 on the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan under Asta Cita 2: Strengthening national defense and promoting self-reliance through food, energy, and water sovereignty, as well as creative, green, and blue economies; designated Merauke as a national food security priority area and Wanam as part of a National Strategic Project (PSN).
June 8, 2025	Minister of Defense	Boven Digoel, South Papua	Together with the Minister of Agriculture, Minister of Forestry, Minister of Public Works, the Presidential Special Staff for Infrastructure; senior TNI officials, and the CEO of Agrinas Palma Nusantara, visited a palm-oil-based biodiesel project in Boven Digoel as part of the national energy resilience strategy to reduce fuel imports.
July 8, 2025	Minister of Defense	Boven Digoel, South Papua	Inspected the 803rd Territorial Development Infantry Battalion for Development (BTP 803/KYK), accompanied by Deputy Army Chief of Staff Lt. Gen. Tandyo Budi Revita and the Governor of South Papua.
June 13, 2025	Commander of the Ministry of Agriculture's Food Security Task Force Maj. Gen. Ahmad Rizal Ramdhani	Wanam, Merauke, South Papua	Site inspection of agricultural fields and new rice plots in Wanam.
July 9, 2025	Minister of State-Owned Enterprises Erick Thohir	Jakarta	Appointed Maj. Gen. Ahmad Rizal Ramdhani as President Director of Bulog and Maj. Gen. (Ret.) Marga Taufiq as Deputy President Director.

August 5, 2025	President Prabowo	Jakarta	Issued Presidential Instruction No. 14/2025 to accelerate national self-sufficiency in food, energy, and water, and mandating cross-ministerial coordination.
August 10, 2025	President Prabowo	Jakarta	Inaugurated Kodam XXIV/Mandala Trikora, led by Maj. Gen. Lucky Avianto, who later emphasized the importance of maintaining order and stability.
August 25, 2025	President Prabowo	Jakarta	Awarded the Bintang Mahaputera Utama to 140 national figures, including businessman Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad) and former Merauke Regent John Gluba Gebze, recognized for their contributions to the food self-sufficiency program.
August 27, 2025	Coordinating Minister for Food Affairs Zulkifli Hasan	Wanam, Merauke, South Papua	Led a coordination team to assess progress in the Food, Energy, and Water Self-Sufficiency Zone with the Minister of Defense, Minister of Public Works, Minister of Environment, Minister of Agriculture, TNI Deputy Commander, the TNI Chief of Staff, Presidential Special Staff for Infrastructure, President Director of Pindad, and Head of the Defense Logistics Agency.
September 16, 2025	Governor of South Papua Apolo Safanpo	Merauke, South Papua	Submitted a formal request (Letter No. 600.3928/PPS/IX/2025) for an additional 486,939 hectares of land for the expansion of the National Food, Energy, and Water Self-Sufficiency zones.
September 18, 2025	Minister of Forestry Raja Juli Antoni	Jakarta	Issued Ministerial Decree No. 591/2025 reclassifying forest areas for non-forest use and revising land-use designations in South Papua Province. The decree converts 143,142 ha in Boven Digoel, 9,731 ha in Mappi, and 333,966 ha in Merauke.

September 24, 2025	Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto	Jakarta	Issued Coordinating Ministerial Regulation No. 16/2025, officially designating the Food, Energy, and Water Self-Sufficiency Development Program in Merauke, Mappi, Asmat, and Boven Digoel as a National Strategic Project (PSN).
September 25, 2025	Government of South Papua Province	Merauke, South Papua	Began drafting the 2025–2044 Provincial Spatial Planning Document (RTRW), aligned with the designation of Merauke, Mappi, Asmat, and Boven Digoel as National Food, Energy, and Water Self-Sufficiency Zones.
September 29, 2025	Coordinating Minister for Food Affairs Zulkifli Hasan	Jakarta	Chaired a cross-ministerial coordination meeting on the acceleration of the National Food, Energy, and Water Self-Sufficiency Zone Development Program.

Shortly after forming the Red and White Cabinet, President Prabowo made his official visit to Merauke. Accompanied by the Minister of Agriculture, the Minister of Defense, the Head of the State Intelligence Agency, the TNI Commander, the Acting Governor of South Papua John Gluba Gebze, and businessman Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad), he inspected Telaga Sari in Kurik District and Wanam in Ilwayab District to observe ongoing planting, harvesting, and new rice field construction. In northern Merauke, two of the ten concession-holding companies, PT Global Papua Abadi and PT Murni Nusantara Mandiri, continued large-scale land clearing, stripping natural vegetation, and replacing it with sugarcane plantations. Their concessions span 30,777 and 52,395 hectares respectively. To secure control over these vast lands, company representatives arrived offering cash and promises of prosperity to the Marind, Yei-nan, and other Indigenous peoples whose livelihoods de-

pend on forests and ancestral lands. Yet, these encounters were often backed by military personnel justified under the pretext of security support.

The discourse of national resilience has thus legitimized the war regime's consolidation of power, with the military occupying a central role. Lieutenant General (Ret.) Muhammad Herindra was appointed chief coordinator for the construction of roads and infrastructure for the food self-sufficiency program. He's working in partnership with the Jhonlin Group owned by Haji Isam, an extractive tycoon with close ties to Prabowo. Soon after, thousands of excavators and soldiers were deployed, not only to build, but also to occupy, dismantle, intimidate, and compel Indigenous people to accept the transformation of their ancestral lands into rice fields, highways, and sugarcane plantations. Merauke quickly became one of the most militarized regions in Indonesia. Three territorial infantry battalions, which area Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, and Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri, were stationed there. Assuming each battalion consists of 700 to 1,000 personnel, the total deployment reached an estimated 2,100 to 3,000 personnel, with numbers expected to rise following the establishment of Kodam XXIV/ Mandala Trikora.

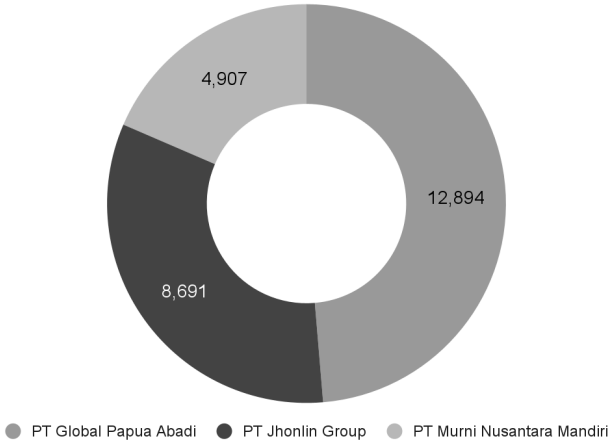
These massive projects, both the a million hectare new rice field and the sugarcane estate, operate under a doctrine that allows no dissent. As Regional Commander Andy Setyawan said, "Even if there is resistance, the national project will continue." From the government's perspective, objections are dismissed as provocation or deemed illegitimate. The case of Vincent Kwipalo illustrates how the rhetoric of security and resilience translates into coercive force. From the very beginning, PT Murni Nusantara Mandiri demarcated his customary lands

without consultation. “Those boundary markers were put up by the company,” he said. Together with his relatives, Vincent refused to surrender their land, believing that it would mean erasing their future. “If we give away our land, how will we and our children live? We will have nothing,” he explained. “Not an inch of this land will we give to them.” Instead of being heard, he was reported to the police for trying to stop the excavators that had begun tearing up his ancestral land.

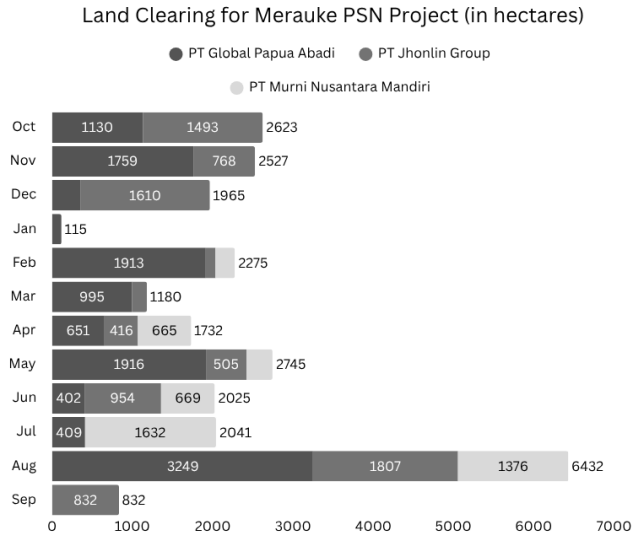
After a year under the war regime in Merauke, the region’s bio-physical landscape has undergone dramatic transformation. Monitoring of three concession-holding companies, PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, and the Jhonlin Group, reveals ongoing large-scale destruction of Indigenous lands. From the start of these projects until September 2025, total environmental damage reached 31,508 hectares, 84 percent of which occurred during the Prabowo-Gibran administration. Within just one year, PT Global Papua Abadi accounted for the largest share of forest and ecosystem loss, clearing 12,894 hectares, followed by the Jhonlin Group with 8,691 hectares, and PT Murni Nusantara Mandiri’s with 4,907 hectares. The scale and pace of clearing suggest that this expansion is far from over. The chart below reveals from October 2024 to September 2025, a total of 26,492 hectares of land were cleared under the Prabowo-Gibran administration, primarily driven by three concession-holding companies: PT Global Papua Abadi, PT Jhonlin Group, and PT Murni Nusantara Mandiri (Pusaka Bentala Rakyat, 2025)

Land Clearing Under the Prabowo-Gibran Administration

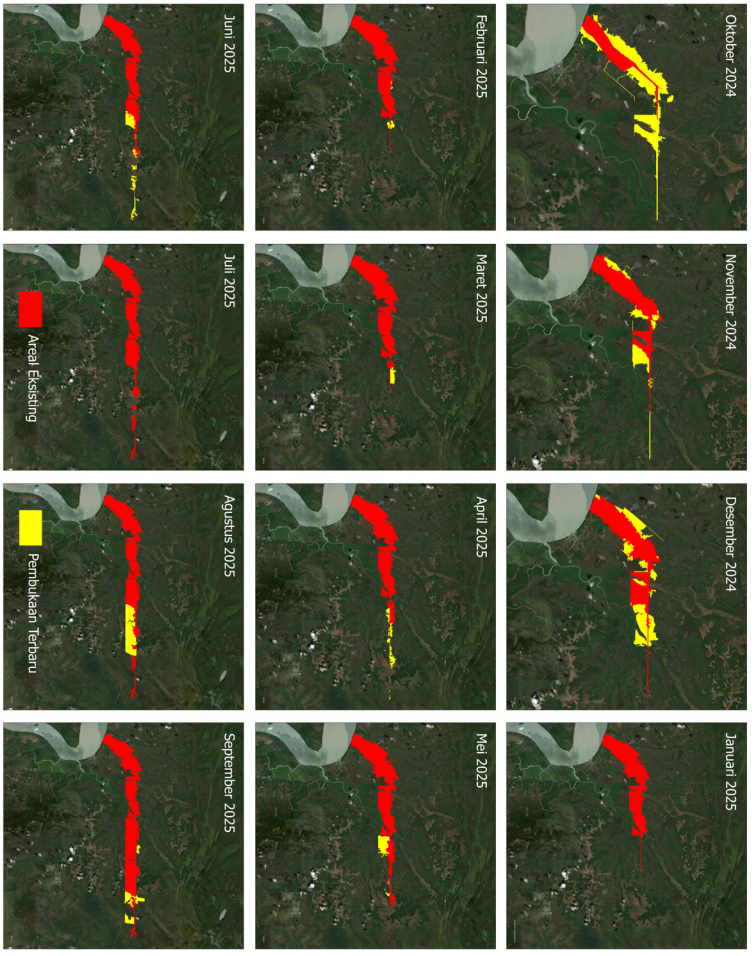
Company Contributions to the National Strategic Project (hectares)



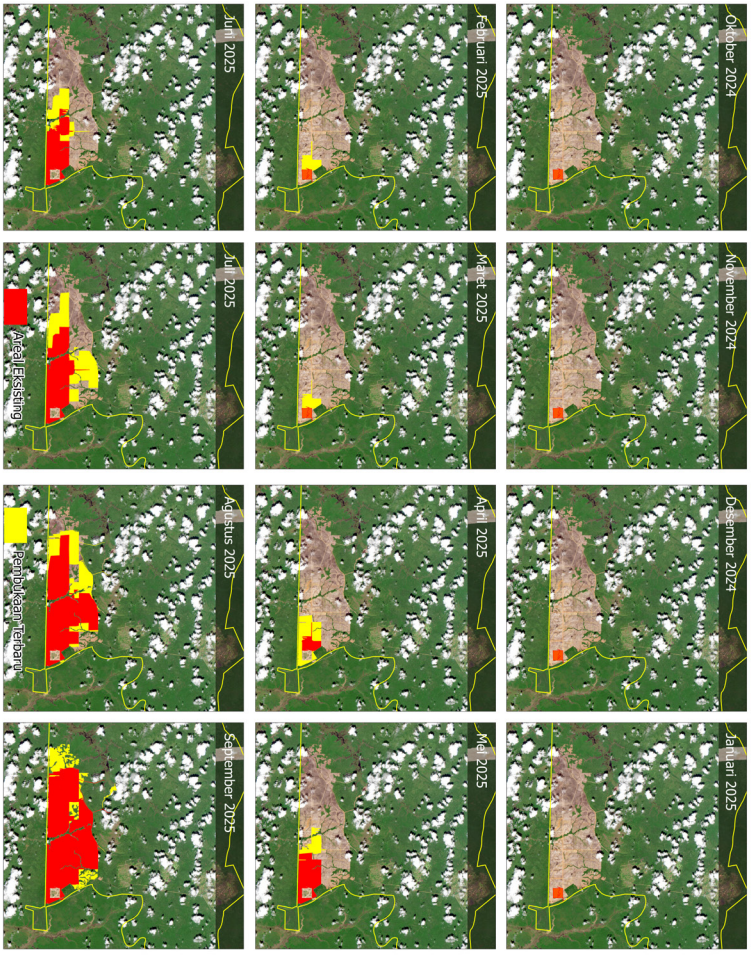
Monthly monitoring further reveals the fluctuations in the rate of Indigenous land clearance across Merauke. Data shows that the food and energy self-sufficiency projects have proceeded without interruption, with the lowest recorded figure being 115 hectares in January. Over the past year, land clearance averaged 2,207.6 hectares per month. The most dramatic surge occurred in August when clearing peaked at 6,432 hectares, nearly three times the monthly average. We hypothesize that this spike appears to coincide with the issuance of Presidential Instruction No. 14/2025 which mandates the acceleration of national food, energy, and water self-sufficiency. In parallel with this environmental destruction, we also observed a sharp intensification of state activity supporting the project, from high-level government visits to the drafting of South Papua Province's new spatial planning document.



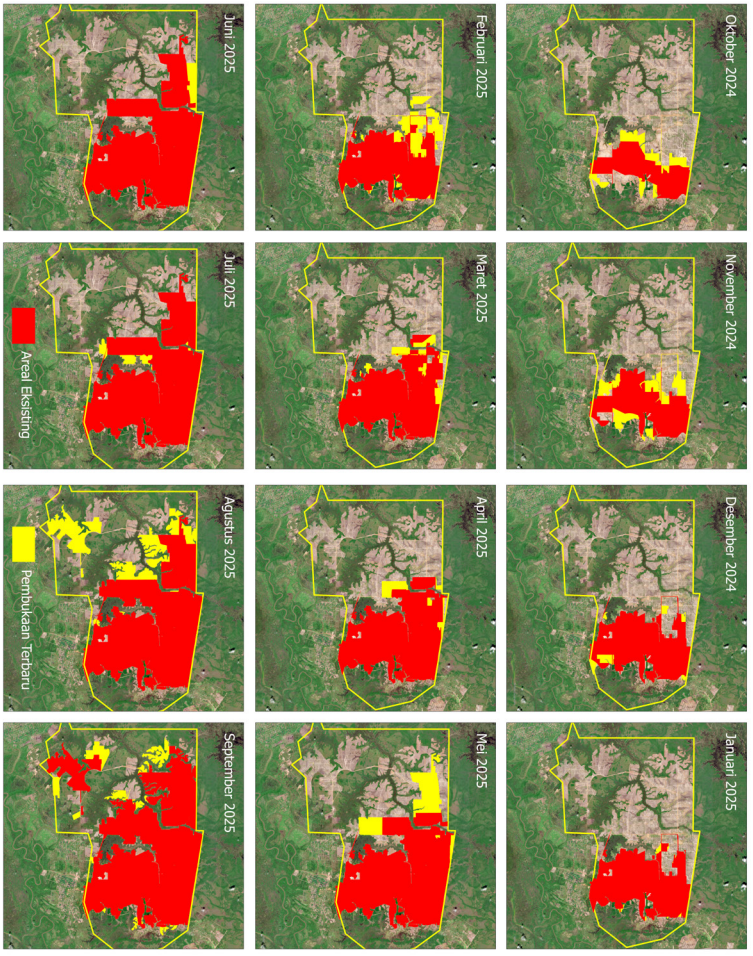
Following the issuance of Presidential Instruction No. 14/2025, the coordination team immediately conducted field inspections to assess project implementation. The Coordinating Minister for Food Affairs acted as chair, joined by the Minister of Defense, Minister of Public Works, Minister of Environment, Minister of Agriculture, the TNI Deputy Commander, the TNI Chief of Staff, the Presidential Special Staff for Infrastructure, the President Director of Pindad, and the Head of the Defense Logistics Agency. Beyond a million hectare new rice field project, road infrastructure construction, and sugarcane plantations, the government's broader plans include the construction of airports, seaports, oil palm plantations, livestock facilities, and oil palm processing and propellant industries. These large-scale developments require vast tracts of land and the reconfiguration of South Papua's spatial landscape.



First Year of Prabowo's Regime - Wanam
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)



First Year of Prabowo's Regime - MNM
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)



First Year of Prabowo's Regime - GPA
(Arief Rossi Ramadhan, 2025)

As part of this directive, provincial governments were instructed to provide every necessary facility, including the allocation of land and spatial restructuring. South Papua Governor Apolo Safanpo sent a formal request to Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Nusron Wahid, requesting approval for the proposed revision of the spatial plan. However, the lands identified for development were still legally designated as forest areas under the Ministry of Forestry's authority. To facilitate these projects, the Minister of Forestry issued Decree No. 591/2025, which reclassified large tracts of forest areas into non-forest areas and altered their functions as part of the spatial plan review for South Papua Province. The decree converted 143,142 hectares in Boven Digoel, 9,731 hectares in Mappi, and 333,966 hectares in Merauke. These sweeping reclassifications completely disregard the existence of Indigenous communities living throughout Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, and Animha; ancestral territories of the Malind, Anim, Kanum, Maklew, and Yei peoples, among others. This rapid acceleration has been carried out in pursuit of a single overarching ambition: to achieve food and energy self-sufficiency "in the shortest possible time".

Casualties of the War Regime

War always spreads terror and claims casualties. Vincent Kwipalo is one among many Indigenous residents who can be counted among the growing list of casualties under the war regime's operations. As the landscape of destruction expanded, more locals found themselves face-to-face with the machinery of self-sufficiency programs. Yasinta Moiwend, for instance, witnessed hundreds of excavators and soldiers invad-

ing, occupying, and destroying the Maklew people's ancestral forests, transforming them into ports, rice fields, and roads. "We wondered what was so special about this place that so many soldiers had to come," Yasinta recalled.

A similar testimony came from Liborius Kodai Moiwend of Wogekel Village. Wearing flip-flops and traditional attire before the Constitutional Court, he described how the government orchestrated terror alongside the dispossession of Indigenous land:[10]

> "When these [companies-holding concession of] National Strategic Project came, they never met with the village elders. They came like thieves entering our villages. On August 12, 2024, PT Jhonlin Group unloaded 300 excavators through the Dwikarya Reksa Abadi dock, a fishing company, and moved them to a place we call yauli. That's when the clearings began. They asked the TNI to come again to secure the project. So they cleared the forest with soldiers standing around. Wherever the forest was being cleared, there were soldiers. Our people couldn't protest because they were armed. That's what silenced us."

10 The hearing for Case No. 112/PUU-XXIII/2025, held on Thursday, September 11, 2025.



Ratapan di Tanah “Eden” (oleh Costan Raharusun)



Fleet of Excavator Owned by Haji Isam's Company in Wanam (Ambrosius Mulait, 2025)

In the concession area controlled by PT Global Papua Abadi, the company began its takeover through persuasion, manipulation, forced eviction, and relocation of families. Before surrendering his customary land, Yakobus Mahuze tried to resist the company's presence. Yet, some of his relatives accused him of standing in the way. "They told me to decide quickly, because the land the company wanted was the access road," he said. Fearing that refusal would endanger his family's livelihood, Yakobus eventually yielded. Under such pressure and threats, the land was finally surrendered.

For some Marind and Yei-nan peoples, the sugarcane plantation companies appeared to promise prosperity, though have yet to be fulfilled. In several Indigenous villages, monuments were erected listing company pledges, such as

new housing, clean water, schools, roads, and jobs. Alongside those promises came small cash payments around Rp300,000 per hectare, sums that companies claimed would yield greater benefits later. Such promises and compensations sowed division and coercion within families, as seen in the experiences of Vincent Kwipalo and Yakobus Mahuze.

Meanwhile, along the Maro River, the Muyu people face the threat of forced displacement. Yulinus Tenot from Soa Village explained, “PT Global Papua Abadi plans to build a port right where we live. About seventy five households will be affected.” According to him, the company brought outsiders to falsely claim the land. As a result, the Muyu people who have lived in Senayu since 1990 now face eviction in the name of infrastructure development to transport plantation goods and commodities. These stories reveal a machinery of violence consolidating private property and extractive enterprise.

Yet the casualties of the war regime are not limited to displaced Indigenous peoples. They also manifest in the irreversible destruction of landscapes and biodiversity. Lands once covered in lush vegetation have turned barren, rivers are blocked, and peat swamps buried. Regenerating forest species are replaced by commercial crops, like rice, sugarcane, and oil palm. Logged trees lie in piles or serve as makeshift tracks for the excavators. The destruction of flora also drives away fauna that once sustained local diets, erasing sources of free protein from the forest. Here lies a paradox at the heart of the war regime: it speaks the language of food and energy security, yet its actions create new dependencies on production, distribution, and consumption of food and fuel.



New Normal (oleh Betty Adii)

On Desertion and the People's War

After asserting that war never truly ends, Michael Hardt and Sandro Mezzadra introduce what they call "desertion". In military terms, desertion means a complete withdrawal from the structures of the armed forces. In the context of confronting a war regime, however, it becomes a political praxis; a collective act of withdrawal from the very structures that sustain and reproduce that regime, including its military, logistical, security economy, and ideological apparatuses that legitimize it. Mao Tse-Tung put it more bluntly as "rebellion" or the "people's war".

This is a historical certainty, not an empty rhetoric. Uprisings and disorders have always emerged most fiercely where rulers commit their gravest atrocities.[11] In South Papua, systematic violence and destruction against Indigenous peoples continue to persist, and are justified in the name of food and energy self-sufficiency. After the first year of the Prabowo-Gibran war regime, it has dispossessed the wealth of Indigenous peoples by clearing forests, driving away wildlife, leveling sacred sites, and spreading terror through armed forces. Sources of food, medicine, livelihood, and autonomy have been systematically dismantled. It is within this landscape of suffering and humiliation that the people's war finds its legitimacy.

Indigenous communities' resistance and international solidarity continue to gain strength each day. The "palang adat"

11 Mao Tse-Tung. (1927). *Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan*.

(customary blockade) has become a symbol of people's war to reclaim territorial control. Across the region, massive protests erupt; workers' movements mobilize; insurrections, boycotts, and land reoccupations unfold; as well as debates among political actors and organic intellectuals. These are signs that the people's war is alive and will continue to be alive.

References

Agamben, G. (1988). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life.* California: Stanford University Press.

Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.

Angus, I. (2023). The War Against the Commons: Dispossession and Resistance in the Making of Capitalism. New York: Monthly Review Press.

Antara. (2023). TNI dan Kementan teken MoU perkuat kerja sama bidang pertanian.

Antara. (2024). Wamenhan Turut Tinjau Lahan Pengembangan Food Estate di Merauke.

Antara. (2025). Komisi VI Harap Agrinas Palma Jadi Motor Kemandirian Energi Indonesia.

Arango Vásquez, L. (2024). *Indigenous peoples, commons and the challenge of sustaining life amid capitalist land grabs*. The Journal of Peasant Studies, 1–28.

Aritonga, M., Irfani, F. (2025). Fear and Raiders in Papua: How thousands of Indonesian soldiers are forcing through a vast agricultural project in indigenous lands and forests. The Gecko Project.

Bhattacharyya, T. (2025). Tidak Ada Gencatan Senjata di Tanah Rampasan: Pembebasan, Bukan Zionisme Liberal. IndoProgress.

Bräuchler, B. (2025). Golden Indonesia 2045: *Neoliberal Development Policies and Environmental Journalism.* Journal of Current Southeast Asian Affairs, 0(0).

De Boever, A. (2009). *Agamben and Marx: Sovereignty, Governmentality, Economy.* Law and Critique, 20(3), 259–270.

de Moura Costa Matos, A.S. (2023). State of Exception. Dalam Sellers, M., Kirste, S. (eds) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer, Dordrecht.

Detik. (2025). KSAD Teken MoU Ketahanan Pangan untuk Kembangkan Ekosistem Pertanian.

Giorgio, D. E., (2024). *A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers.* Journal of Agrarian Change, 24(1)

Hardt, M., & Mezzadra, S. (2024). *A global war regime*. Sidecar.

Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and democracy in the age of empire.* Penguin Press.

Haripin, M. (2020). *Civil–military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war*. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Marzuki, K. I. (2020). T*he Army and Ideology in Indonesia: From Dwifungsi to Bela Negara*. Routledge.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Nugroho, S. S. (2022). *Quasi-civilian defence minister and civilian authority: The case study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency.* Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183.

Haripin, M., Priamarizki, A., & Sebastian, L. C. (Eds.). (2022). *Military modernisation and civil-military relations in Indonesia.* Palgrave Macmillan.

Heinecken, L., Leuprecht, C. (2025). *Military Operations in Response to Domestic Emergencies and Global Pandemics.* The Military and Society. Springer, Cham.

Honna, J. (2013). *The Army and the Indonesian Transition.* Routledge Handbook of Contemporary Indonesia.

Honna, J. (2022). *Health Security in Indonesia and the Normalization of the Military's Non-Defence Role.* ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Humphreys, S. (2006). *Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben's State of Exception.* The European Journal of International Law, Vol. 17 No. 3.

Jun, H. (2024). *2024 Indonesian Presidential Election: How Prabowo Won.* Asia-Pacific Review, 31(2), 105–116.

Jong, N. H. (2024). Kegagalan di Masa Lalu Tidak Dapat Menghentikan Indonesia dari Penebangan Hutan dan Lahan Adat untuk Pertanian. Mongabay.

Karl, N. & Habtom, T. (2023). *An Ecological State of Exception: Applying Carl Schmitt to Climate Change.*

Kemenhan. (2024). Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menhan Sjafrie Fokus Melanjutkan dan Mengembangkan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara.

Kemenhan. (2024). Tiba di Merauke, Wamenhan M. Herindra Tinjau Panen Raya Food Estate di Papua Selatan.

Mao Tse-Tung. (1927). Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan.

Mezzadra, S. (2011). *The Topicality of Prehistory: A New Reading of Marx's Analysis of "So-called Primitive Accumulation*." Rethinking Marxism, 23(3), 302–321.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2022). *The capitalist virus*. Politics, 44(2), 188-202.

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2024). *The Rest and the West: Capital and Power in a Multipolar World*. Verso Books.

Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.

Paju Dale, C. J. (2025). Kuliah Umum: Gerakan Palang Adat dan Salib Merah: Kolonialisme dan Kapitalisme Hijau, Kekristenan Pribumi, dan Determinasi Masyarakat Adat di Tanah Papua. Youtube Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). PSN Merauke II: Perampasan Tanah, Deforestasi, dan Ancaman Etnosida. Pusaka Bentala Rakyat.

Pusaka. (2024). Catatan Akhir Tahun 2024: Ketidakadilan Ekstraktivisme. Pusaka Bentala Rakyat.

Priamarizki, A., & Haripin, M. (2024). *A Most Militarised Cabinet*. New Mandala.

RRI. (2025). Menhan Tinjau Rencana Pengembangan Biodiesel di Papua Selatan.

RRI. (2025). Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora Tiba di Merauke.

Savitri, L. A. (2025). Nekropolitik Negara: Militerisasi Produksi Pangan di Tanah Malind Anim. Pusaka Bentala Rakyat.

Supriatma, M. (2025). Expansion of the Indonesian Army: A Creeping Dual Function? Fulcrum.

Solidaritas Merauke. (2025). Deklarasi Solidaritas Merauke.

Tempo. (2025). Jika Tentara Mengelola Kebun Sawit Bermasalah Lewat Agrinas Palma.

Tempo. (2025). Pesan Prabowo untuk Kapolri dan Panglima TNI saat Tinjau Kebun Sawit Ilegal.

The Editors. (2022). *Current Data on the Indonesian Military Elite: October 2014–December 2021. Indonesia 114*, 99-223.

TNI AD. (2024). Kasad: Batalyon Penyangga Daerah Rawan Dukung Keamanan dan Percepatan Pembangunan.


PUSAKA
UDEIDO
COLLECTIVE